

**ANALISIS DERAJAT OTONOMI FISKAL
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 1990/1991-2003**

S K R I P S I



NTik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh :

ATIK NURYANTI

990810101104

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2005**

**ANALISIS DERAJAT OTONOMI FISKAL
PEMERINTAH KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 1990/1991-2003**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi

Universitas Jember

Oleh :

Atik Nuryanti

990810101104

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2005

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS DERAJAT OTONOMI FISKAL PEMERINTAH KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 1990/1991 - 2003

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : ATIK NURYANTI

N. I. M. : 990810101104

J u r u s a n : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

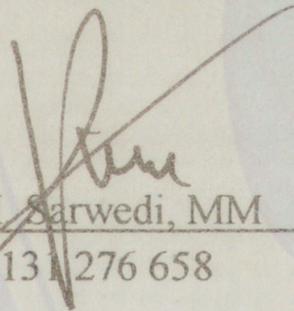
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

07 MEI 2005

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

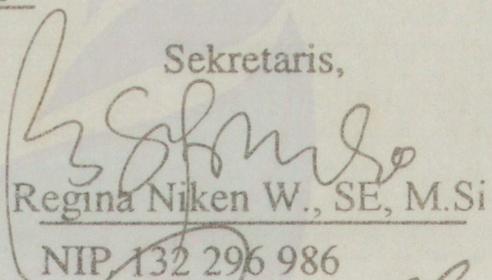
Susunan Panitia Penguji

Ketua,



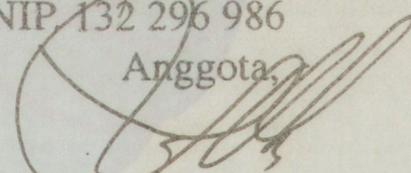
Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

Sekretaris,



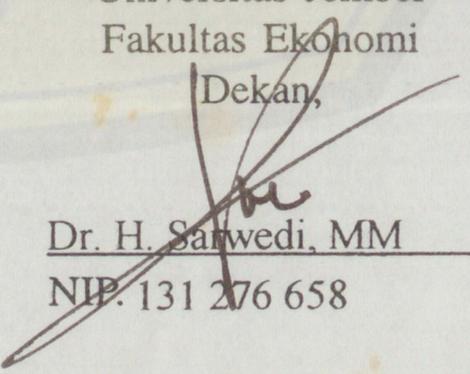
Regina Niken W., SE, M.Si
NIP. 132 296 986

Anggota,



Drs. Sonny Sumarsono, MM
NIP. 131 759 836

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

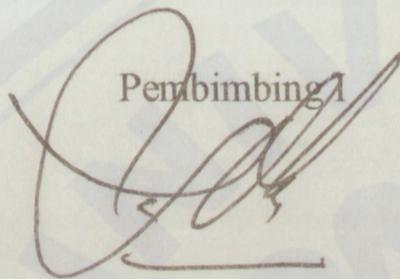


Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Kota Kediri
Tahun Anggaran 1990/1991-2003
Nama Mahasiswa : Atik Nuryanti
NIM : 990810101104
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan

Pembimbing I


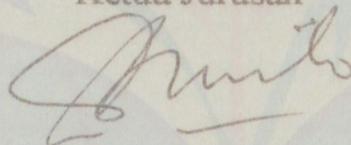
Drs. H. Sonny Sumarsono, MM
NIP: 131 759 836

Pembimbing II



Drs. Zainuri, Msi
NIP: 131 832 336

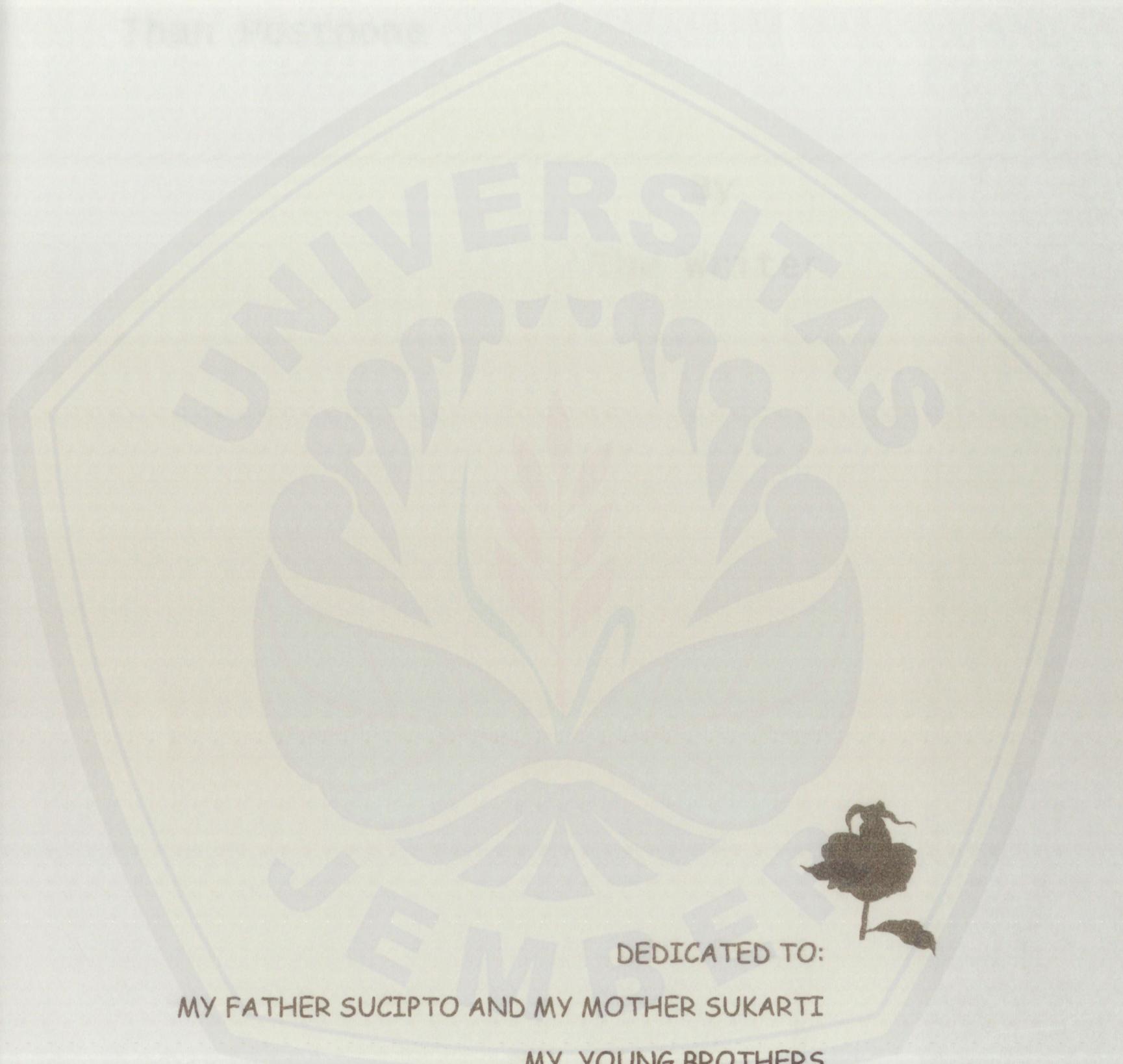
Ketua Jurusan



Drs. Johannes Sugiarto, SU
NIP: 130 610 494

Tanggal Persetujuan: 19 April 2005

Do. Earninging. More. Early. Is. Better.
Than. Mustons.



DEDICATED TO:

MY FATHER SUCIPTO AND MY MOTHER SUKARTI

MY YOUNG BROTHERS

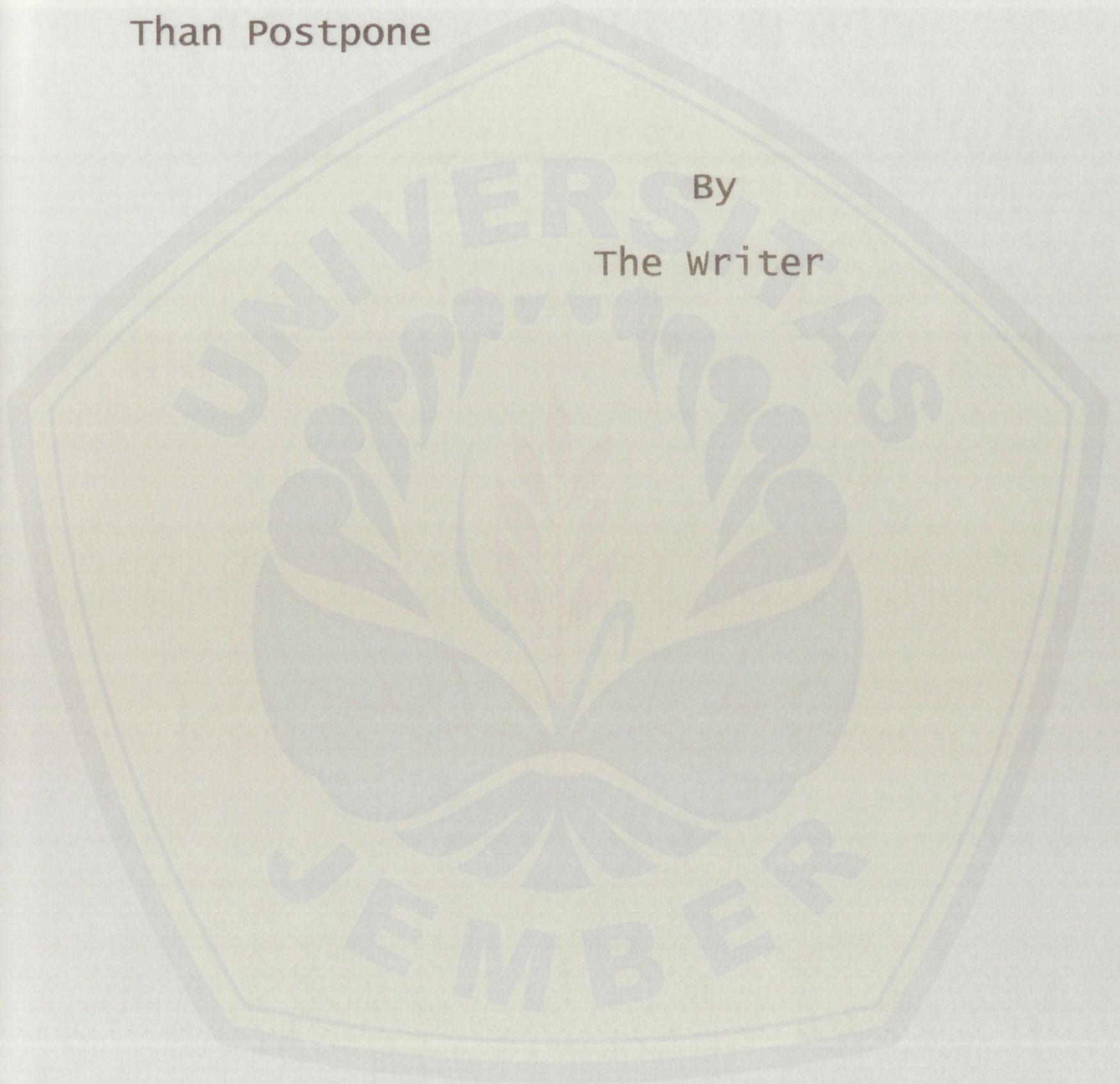
ISMAIL SHOLEH AND MAHFUD SETIAWAN

MY COLLEGE

MOTTO

Do Everything More Early is Better
Than Postpone

By
The writer



ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Pemerintah Kota Kediri, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) serta Bantuan Pemerintah Pusat terhadap DOF Kota Kediri pada tahun anggaran 1990/1991-2003. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang berupa data time series tahunan selama 14 tahun, yang didapatkan dengan mencatat dan mensurvey data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pelaksana dan Pembangunan Kota (BAPPEKO), Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan Kota Kediri, serta studi pustaka.

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Pemerintah Kota Kediri masih rendah, oleh karena itu peningkatan PAD masih sangat dibutuhkan agar dapat membiayai operasional Pemerintahan Kota Kediri. IKR dihitung dengan analisa proporsi PAD terhadap pengeluaran rutin pada tahun yang sama (dalam prosentase), Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Kediri pada periode tahun anggaran 1990/1991-2003 mencapai rata-rata 81,14% namun pada masa transisi era pra otonomi menuju otonomi DOF Kota Kediri mengalami penurunan yang drasitis yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran yang belum dapat diimbangi oleh peningkatan penerimaan. DOF dihitung dari proporsi PAD terhadap APBD yang dikurangi Transfer Pemerintah Pusat (dalam prosentase). Sedangkan pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat dihitung dengan menggunakan analisis regresi linier Sederhana dengan menggunakan Uji Statistik yang terdiri atas Uji F dan Uji t serta Uji Ekonometrik yang terdiri atas Uji Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Indeks Kemampuan Rutin suatu daerah akan semakin besar jika PAD dapat membiayai pengeluaran rutin pada setiap tahun anggaran. Derajat otonomi fiskal yang tinggi akan mendukung kemajuan suatu daerah karena pembangunan-pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan pada umumnya dapat dilaksanakan tanpa mengandalkan subsidi pemerintah, daerah lain di wilayah NKRI maupun bantuan dari luar negeri.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis tidak menutup kritik dan saran agar dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Tak lupa penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tak langsung atas bimbingan, bantuan, dorongan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Ungkapan terima kasih, penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Zainuri, Msi dan Bapak Drs. H. Sonny Sumarsono, MM selaku Dosen Pembimbing.
2. Bapak Drs. H. Achmad Qosjim, Msi selaku Dosen Wali
3. Bapak Drs. J. Sugiarto, SU selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
4. Bapak Dr. H. Sarwedi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
5. Tim Penguji Skripsi yaitu Bapak Dr. H. Sarwedi, MM, Ibu Regina Niken, SE, MSi dan Bapak Drs. Sonny Sumarsono, MM.
6. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Jember
7. Pustakawan dan Pustakawati UPT Perpustakaan Universitas Jember, Ruang Baca POMA FE UNEJ dan Perpustakaan Daerah Kota Kediri
8. Seluruh Pegawai dan Staff Pemerintah Kota Kediri, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pelaksana Pembangunan Kota (Bappeko) Di Lingkungan Pemerintahan Kota Kediri
9. Kakanda Jamaludin, SH yang telah mengisi ruang kehidupanku
10. Ibu Siti Aliyati Al Busyairi, SE, MSi dan Bapak Nuril Huda, SE, MSi serta Junior yang baru hadir.

11. Mbak Futum, Sahabat Haeron & Mbak Dana, Sahabat dan Sahabati Pergerakan, Rekan-Rekan Pengurus HMJ IESP Periode 2002-2003, Rekan-Rekan di IMEPI (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia) dan Saudara-Saudaraku di Perguruan Merpati Putih.
12. Sahabat Nanang, Bachtyar & Elis, Dhi'Ti2n, Dhi'Diah, Bu Husnan dan Dhi'Vica
13. Keluarga di Kostan Jawa VIII No.1 (Rietha, Alif, Novita Kupret, teman-teman kost lainnya serta keluarga P. Syamsuri), Kostan Halmahera Raya No. 1 (adik-adikku iput, rex, V, saritem, mimin, nit-not, Tiepo, dan keluarga Bapak Bowo) serta Kelurga Besar Bapak Kholili di Patrang.
14. Disbun Computer Crew dan Evana Computer Crew yang membantu secara teknis penulisan skripsi.

Jember, 19 April 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2 Landasan Teori.....	7
2.2.1 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	7
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).....	11
2.2.3 Desentralisasi Fiskal	15
2.2.4 Esensi/Hakekat Dana Alokasi Umum.....	17
2.2.5 Prinsip/Azas Dana Alokasi Umum	19
2.2.6 Upaya Peningkatan PAD	22
2.2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	24
2.2.8 Derajat Otonomi Fiskal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi.....	25

III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	28
3.1.1 Jenis Penelitian	28
3.1.2 Unit Analisis.....	28
3.1.3 Populasi	28
3.2 Prosedur Pengumpulan Data.....	28
3.3 Metode Analisis Data	29
3.3.1 Analisis Proporsi	29
3.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda	30
3.3.3 Uji Statistik.....	30
3.3.4 Uji Ekonometrik.....	33
3.4 Definisi Operasional.....	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Kediri.....	36
4.1.1 Letak Geografis	36
4.1.2 Penduduk Dan Mata Pencaharian.....	37
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	37
4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	37
4.2.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	48
4.2.3 Bantuan Pemerintah Pusat.....	53
4.3 Analisis Data.....	56
4.3.1 Analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR).....	56
4.3.2 Analisis Derajat Otonomi Fiskal (DOF).....	57
4.3.3 Analisis Pengaruh Bantuan Pemsat terhadap DOF.....	58
4.3.4 Uji Statistik	59
4.3.5 Uji Ekonometrik.....	60
4.3.6 Pembahasan Hasil Estimasi	63
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.4 Kesimpulan dan Saran.....	66
4.5 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

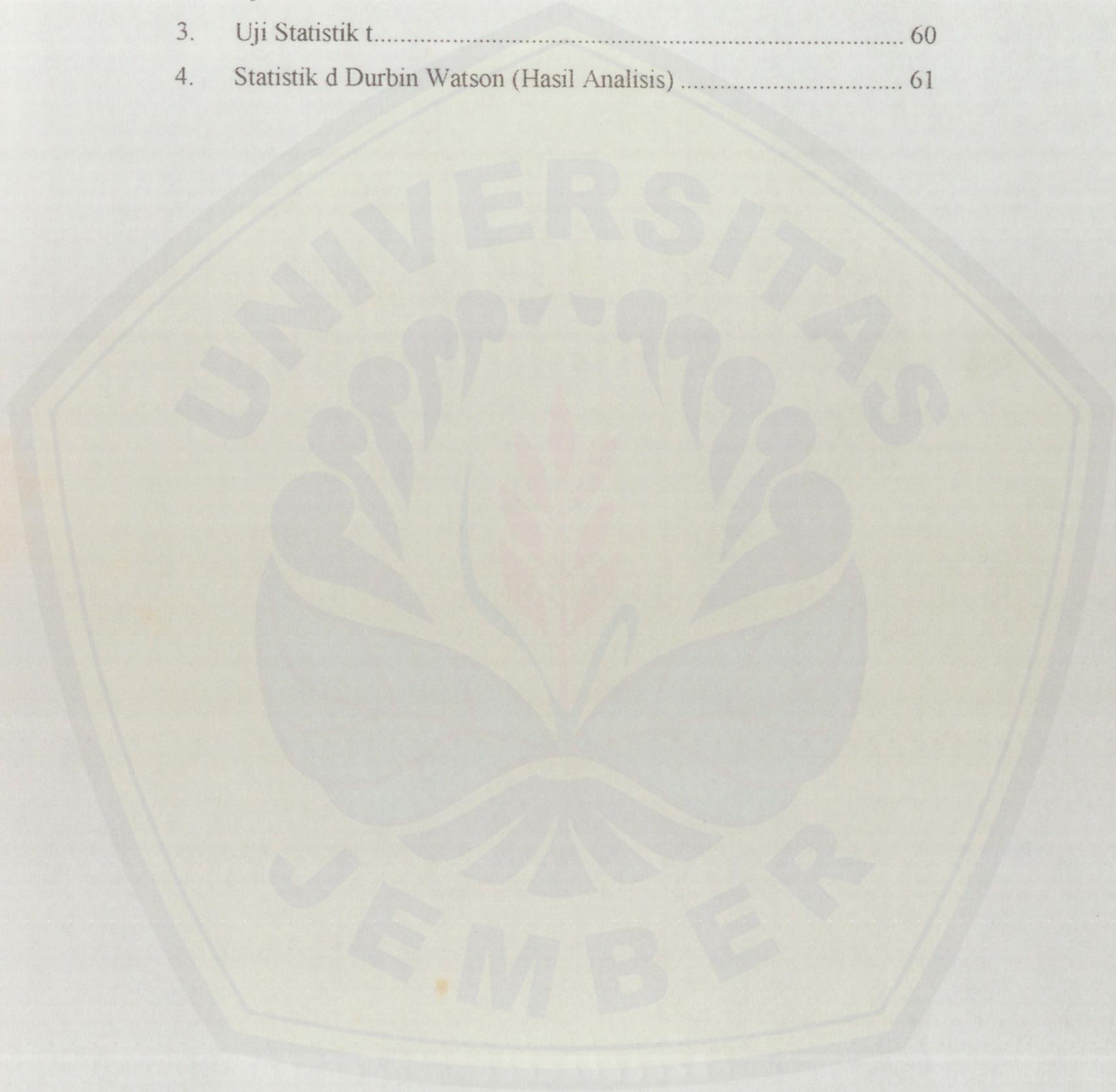


DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.	Luas Wilayah Kota Kediri.....	36
2.	Penerimaan Pajak	39
3.	Penerimaan Retribusi Daerah.....	42
4.	Penerimaan Hasil Usaha Daerah	43
5.	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah.....	45
6.	Target dan Realisasi PAD	46
7.	Target dan Realisasi Penerimaan APBD.....	50
8.	Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan	51
9.	Perkembangan Kontribusi PAD terhadap APBD.....	53
10.	Bantuan Pemsat Kepada Pemkot Kediri	54
11.	Analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Kediri.....	56
12.	Analisis Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Kediri.....	57
13.	Hasil Analisis Regresi Pengaruh Bantuan Pemsat Terhadap DOF Kota Kediri.....	58

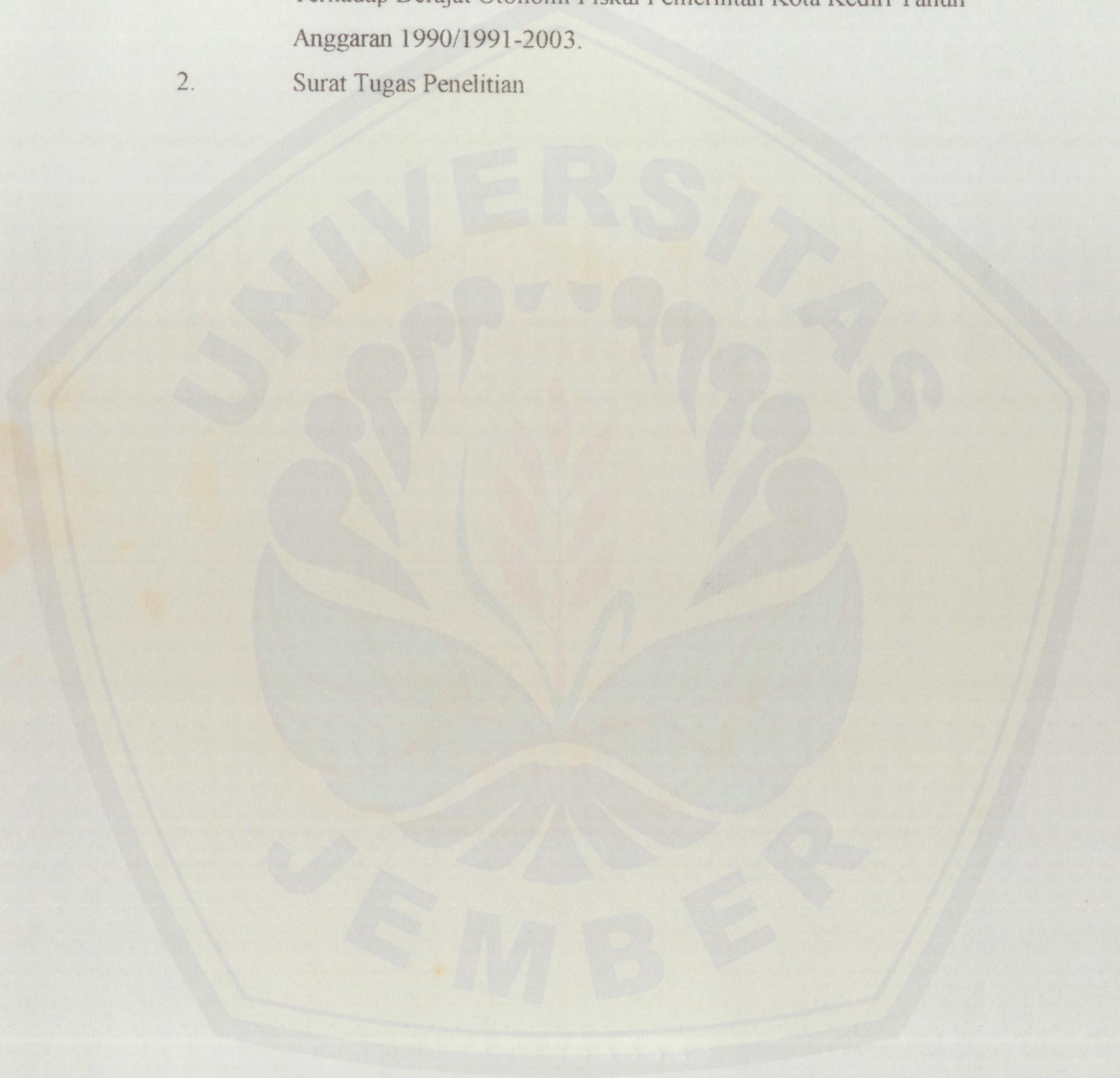
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.	Statistik d Durbin Watson	33
2.	Uji Statistik F	59
3.	Uji Statistik t.....	60
4.	Statistik d Durbin Watson (Hasil Analisis)	61



DAFTAR LAMPIRAN

- | Lampiran | Perihal |
|----------|--|
| 1. | Hasil Analisis Kuantitatif Pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat Terhadap Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003. |
| 2. | Surat Tugas Penelitian |



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya hakekat pembangunan nasional adalah perubahan yang diarahkan kepada perbaikan kondisi hidup manusia dan peri kehidupan masyarakat dalam suatu bangsa. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu-kesatuan langkah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. (GBHN, 1993: 421)

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut maka perlu diusahakan terciptanya kondisi nasional yang memberi rangsangan dan peluang seluas-luasnya bagi seluruh daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Adanya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 yang secara resmi diberlakukan pada 1 Januari 2001 membawa angin segar bagi seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Undang-undang otonomi daerah telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang – Undang otonomi daerah yang terbaru (Tahun 2004) memberikan kewenangan yang seluas-luasnya terhadap Pemerintah Daerah dimana kewenangan sebelumnya bersifat luas, nyata dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Disamping itu dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah juga untuk menjawab perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah itu maka otonomi suatu daerah merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dilepaskan dari daerah tersebut. Dalam hal ini utamanya dititik beratkan pada Pemerintah Daerah Tingkat II yang merupakan perangkat Pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka pembangunan daerah dapat tepat mencukupi kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat untuk

meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Untuk itu pembangunan yang terpadu dan serasi yang sesuai dengan potensinya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang dilakukan terutama dalam pembangunan daerah akan dipengaruhi oleh kemampuan keuangan ekonomi daerah tersebut, sehingga keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Mengingat aspek keuangan daerah merupakan masalah utama yang mampu berdampak luas terhadap pembangunan seluruh bidang maka dalam meningkatkan pembangunan daerah perlu meningkatkan kemampuan untuk menghimpun dana secara wajar dan tertib sehingga pemerintah daerah terdorong untuk meningkatkan kemandirian di daerahnya masing-masing.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. Kemandirian daerah merupakan suatu tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi mengingat dalam era globalisasi perdagangan bebas nanti, setiap daerah diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain yang tersebar di seluruh belahan dunia. Terutama dalam hal menarik sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Namun kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daerah masih sering mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Daerah, yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap Pengeluaran Rutin Daerah dalam persentase tahun yang sama. Berdasarkan data yang tersedia dalam kurun waktu Pelita V (1991/1992-1993/1994), misalnya tergambar bahwa rata-rata IKR untuk Daerah Tingkat II seluruh Indonesia masih sangat rendah, bahkan cenderung menurun, dari 25,5% (1991/1992) menjadi 23,1% (1992/1993) kemudian menjadi 18,1% (1993/1994). Apabila dibuat

suatu peringkat maka sejak 1991/1992 sampai 1993/1994 terdapat enam propinsi yang rata-rata IKR-nya berada di bawah 10%, seperti Timor-Timur, Irian Jaya, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Jambi. Hal ini menunjukkan kemampuan Daerah Tingkat II dalam membiayai pembangunan masih sangat rendah.

IKR masing-masing daerah akan menunjang Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Otonomi fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Namun demikian harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari IKR Daerah Tingkat II seluruh Indonesia belum mampu membiayai pengeluaran rutin. Karena itu pembangunan daerah dalam era otonomi daerah yang memiliki kewenangan seluas-luasnya bisa diwujudkan hanya apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Keuangan yang efektif ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat mandiri terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi, dan sebagainya. (Radianto, 1996: 39)

Untuk mengetahui derajat otonomi fiskal daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonominya salah satu indikatornya dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk *block grant*). Wijaya (1992: 41)

Pemerintah Kota Kediri yang sebagian besar penduduknya adalah bekerja di bidang industri menyambut hangat dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. PAD Pemerintah Kota Kediri sejak diberlakukannya otonomi daerah hingga tahun anggaran 2003 adalah sebagai berikut: tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 13.704.520.488,66, tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 21.246.976.875,97 dan tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 26.209.849.527,16. 16. Setiap tahun anggaran PAD Kota Kediri selalu mengalami peningkatan. (Perda Kota Kediri)

Adanya peningkatan secara terus-menerus diharapkan Kota Kediri mampu menjadi pemerintahan yang benar-benar otonom terutama dalam hal fiskal. Semakin mandiri Pemerintah Kota Kediri terutama dari segi fiskal daerah, maka peluang untuk menjadi Kota yang maju akan lebih besar. Dengan otonomi fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka daerah tersebut mampu mencukupi kebutuhan operasional pemerintahannya dan melakukan pembangunan daerahnya tanpa menggantungkan subsidi dari Pemerintah Pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Berapakah Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991-2003?
2. Berapakah Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991-2003?
3. Bagaimanakah pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991-2003?

1.3 Tujuan Penelitian

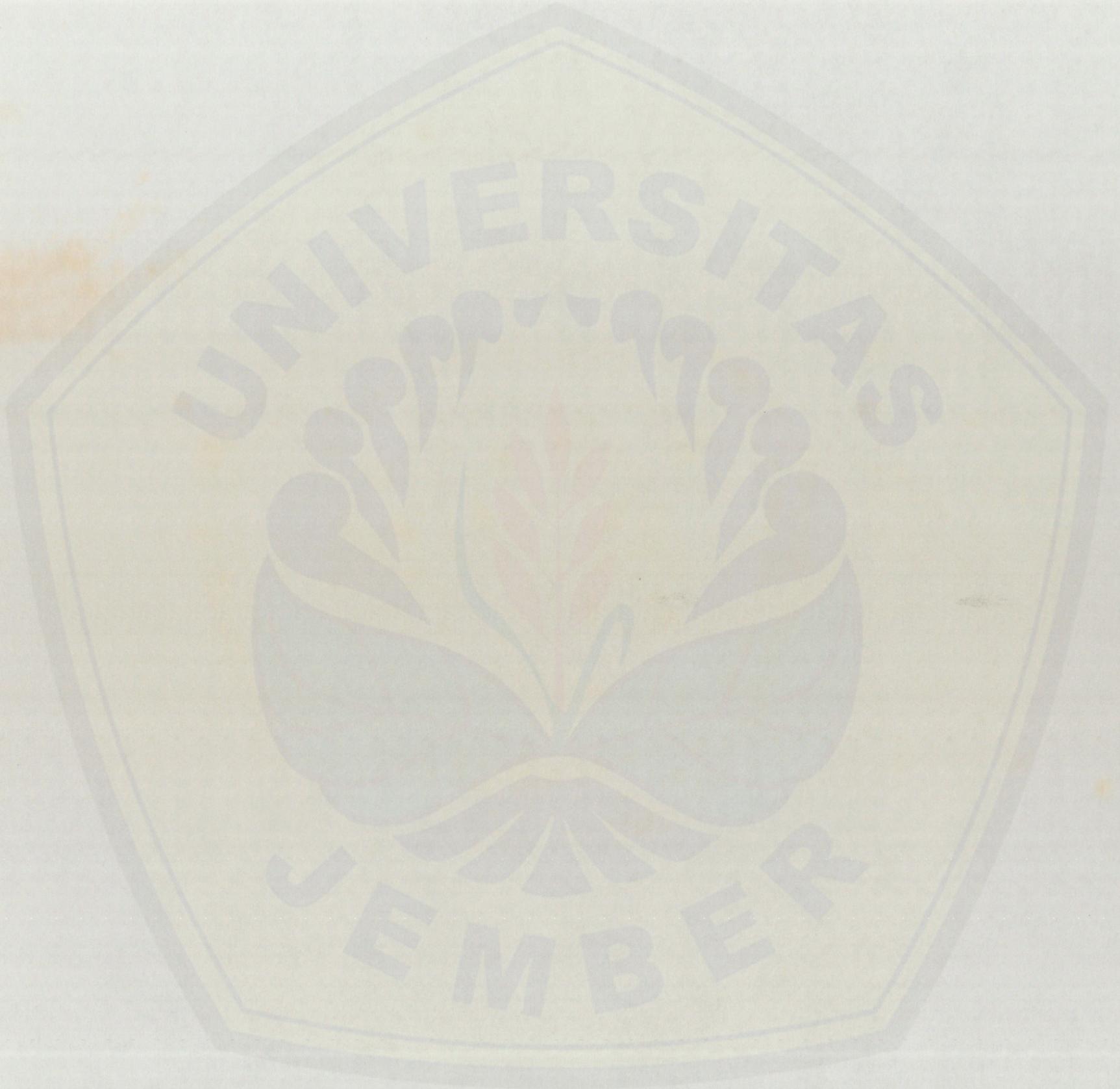
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991-2003.
2. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991-2003.
3. Pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991-2003.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana informasi tentang penulisan karya tulis dengan topik yang sama.

2. Menambah wawasan pengetahuan tentang otonomi fiskal daerah di era reformasi
3. Bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Kediri dalam pengelolaan Fiskal



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya

Studi empiris yang dilakukan oleh Nanga (1991) dengan menggunakan analisa regresi dan korelasi telah melihat adanya pengaruh tingkat Perkembangan Ekonomi Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) daerah di Kabupaten Malang, Probolinggo dan Trenggalek (sampel pada Dati II se Jawa Timur). Disimpulkan bahwa, kedua faktor tersebut secara serempak berpengaruh positif terhadap Derajat Otonomi Fiskal Daerah, baik dibuktikan dengan model regresi individual maupun dengan model regresi gabungan.

Menurut hasil penelitian Radianto (1996) terhadap otonomi keuangan daerah di Maluku, melihat adanya pengaruh Perkembangan Ekonomi Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat. Dengan menggunakan Partial Adjustment Model (PAM), Radianto menemukan hasil analisis bahwa Perkembangan Ekonomi Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang masing-masing variabel tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap derajat otonomi fiskal daerah. Semakin tinggi tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah semakin tinggi pula derajat otonomi fiskal daerah. Begitu pun semakin besar bagian bantuan *block (block grant)* didalam total bantuan Pemerintah Pusat, semakin meningkatkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

“Knowledge of the types and characteristic of the services to be provided may allow one to consider the best federal structure to provide those service. In that case, the issue is how many governments there should be or, equivalently, how big they should be. At one end of the spectrum, some service may only require one government, in which case it would

cover the entire nation. In contrast, some service may be provided better if there are many small governments.” (Fisher, 1996: 55)

Dalam Kutipan Diatas Fisher mengatakan bahwa pemerintahan akan dapat memberikan jasa pelayanan yang lebih baik dengan adanya pemerintahan yang lebih kecil. Maksud dari kalimat tersebut bahwa dengan adanya pemerintahan daerah otomatis pemerintah daerah akan dapat memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang sentralistik.

Di Indonesia penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah secara resmi dilaksanakan pada tahun 2001. Hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah telah diatur dengan UU. No. 25 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dasar Pendanaan Pemerintahan Daerah

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN.
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN.
4. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.

Sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bersumber dari:

1. sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;
2. penerimaan Pinjaman Daerah;
3. Dana Cadangan Daerah; dan
4. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

1. Pendapatan Asli Daerah(PAD)

PAD bersumber dari:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar - daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan

- a. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- c. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
- d. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.
- e. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.
- f. Pinjaman Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

- g. Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS)

Kristiadi (1992: 47) menyatakan bahwa penyerahan sumber pajak kepada daerah untuk dipungut sebagai pajak daerah termasuk retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Pendapatan ini sering disebut sebagai "Pendapatan Asli Daerah Sendiri"(PADS).

Berkaitan pentingnya peranan PADS sebagai sumber penerimaan murni daerah, maka yang menjadi sumber penerimaan daerah diluar subsidi adalah: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lainnya (UU No. 5 Tahun 1974, pasal 55)

Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lainnya sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak sebagai salah satu PADS, merupakan iuran wajib berupa uang atau denda yang dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Kaho, 1997 : 129).

Pengertian pajak menurut Sumitro (1997: 29) pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti propinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedang Davey

(1988: 39) merumuskan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dengan pengaturan dari daerah sendiri.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

2. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Feldman (dalam Nurpratiwi, 1997: 59) merupakan penerimaan yang diperoleh penguasa publik dari rumah tangga swasta, berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi-prestasi yang diselenggarakannya atas usul dan kepentingan rumah tangga swasta dan prestasi tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, secara khusus dilaksanakan sendiri oleh pengawas publik.

Selanjutnya Bawazier (1996: 15) memberikan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dari pengertian ini maka retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, hal ini tergantung dengan besar kecilnya jasa layanan yang diberikan oleh daerah yang bersangkutan.

Secara konseptual terdapat berbagai pendapat pro dan kontra atas perlu atau tidaknya penyediaan suatu barang dan jasa diberi retribusi. Mengenai hal ini dapat ditarik suatu kesimpulan tentang perlu atau tidaknya retribusi tersebut ditarik, tergantung dari "derajat kemanfaatan" suatu barang dan jasa itu sendiri. Menurut Santoso (1955: 22) semakin dekat kemanfaatan suatu barang dengan "private goods", maka pembiayaannya berasal dari retribusi. Sebaliknya semakin dekat

kemanfaatannya suatu barang dengan “public goods” maka pembiayaannya berasal dari pajak.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibnu Rejo (1995: 17) pada prinsipnya kemanfaatan dalam penarikan retribusi, adalah mereka yang tidak mendapatkan manfaat dari penyediaan barang/jasa tidak harus membayar. Sebaliknya mereka yang tidak membayar dapat dikecualikan dari mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.

3. Pendapatan Perusahaan Daerah

Sumber penerimaan daerah dari Perusahaan Daerah dalam hal ini adalah laba BUMD. Oleh sebab itu dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan daerah haruslah bersifat profesional dan harus tetap berpegang teguh pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisien.

Landasan bagi pendirian perusahaan daerah sampai saat ini masih tetap bertumpu pada UU. No. 5 tahun 1962. Menurut Devas (1989: 111) pendirian perusahaan daerah didasarkan pada pertimbangan untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan daerah, serta untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah. Sementara itu Alhabsyi (1996) mengenai lapangan usaha perusahaan daerah, tidak ada batasan yang tegas sehingga banyak sekali lapangan usaha yang dijadikan bidang usaha, seperti air minum, hotel, bioskop, tempat rekreasi dan lain-lainnya.

Dari uraian diatas tampak bahwa, perusahaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan murni daerah, khususnya PADS dengan posisi yang demikian ini menempatkan perusahaan daerah pada posisi strategis sebagai penghasil dana untuk manambah kemampuan APBD dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.

4. Pendapatan Lain-lain

Sumber pendapatan lain-lain bagi pemerintah daerah adalah penerimaan dinas-dinas. Menurut Syaichu (1996: 67) penerimaan dinas-dinas adalah penerimaan yang diterima oleh dinas-dinas yang secara

langsung memberikan pelayanan dan jasa perijinan kepada masyarakat tidak termasuk dinas pendapatan daerah.

Menurut Kaho (1997: 172) dinas-dinas daerah, sekalipun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan dan jasa dengan imbalan, dari sinilah daerah dapat menambah PADSnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, sekalipun dinas-dinas daerah ditempatkan sebagai sumber PADS, hal ini bukan berarti dinas daerah dapat bertindak sebagai instansi *making*, namun demikian dinas daerah tetap menjalankan fungsi pelayanannya. Hal ini disadari bahwa fungsi instansi pemerintah adalah *public service*.

Selanjutnya sebagai sumber penerimaan daerah adalah penerimaan lain-lain, seperti dikemukakan Devas (1989: 31) bahwa kelompok penerimaan lain-lain dalam anggaran daerah tingkat II, mencakup berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat-alat dan bahan sisa, penerimaan dari sewa, bunga pinjaman Bank dan Giro, serta penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

Berdasarkan konsep teoritik diatas, maka penerimaan PAD dari sektor seperti tersebut diatas akan sangat bergantung pada upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya maupun pencarian obyek-obyek baru yang diperkirakan mampu menjadi sumber bagi peningkatan PAD. Menurut Devas (1989: 143) ada tiga tolok ukur untuk menilai pendapatan daerah, yakni: (1) upaya pajak, (2) daya guna (*efficiency*), (3) hasil guna (*Effectiveness*). Sementara itu tujuan utama pengelolaan adalah: (1) tanggung jawab, (2) memenuhi kewajiban keuangan, (3) hasil guna dan daya guna, dan (4) pengendalian.

Santoso (1995: 8) menyatakan, meskipun PADS tidak harus dapat membiyai seluruh anggaran belanja daerah namun proporsi PADS terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat

kemandirian suatu daerah, sering juga disebut kemandirian fiskal (*fiscal independence*). Menurut John F. Due (1984) kemandirian fiskal pada garis besarnya mempunyai dua aspek, yakni (1) aspek kuantitatif yaitu yang berhubungan dengan jumlah uang yang akan ditarik atau dibelanjakan, (2) aspek kualitatif, yaitu yang berhubungan dengan jenis pajak, kemandirian fiskal adalah rasio antara PADS dengan Total Penerimaan Daerah.

Ibnu Syamsi (1988) menjelaskan bahwa penerimaan daerah sebenarnya memang diharapkan dari PADS, sebagai penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan PADS maka berarti semakin tinggi kualitas otonominya. Kemudian jika ditinjau dari sudut kebijakan menurut Pontjowinoto (1991: 33) dalam penggunaan dana, PADS merupakan sumber pembiayaan yang paling memberikan otonomi kepada daerah. Sedangkan Davey (1988: 260) mengemukakan bahwa pemerintah daerah akan dapat menikmati tingkat otonomi yang diinginkan yaitu kebebasan bertindak jika mereka sendiri yang mencari sebagian besar uang yang mereka perlukan dan mereka belanjakan. Oleh karena itu menurut Kingsley (1996: 156) pemerintah lokal memerlukan otonomi keuangan yang lebih banyak untuk melakukan tanggung jawabnya.

2.2.3 Desentralisasi Fiskal

Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah otonom, tidak lain adalah penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Untuk merealisasikan ketentuan pasal 8 diatas maka pemerintah mengeluarkan UU. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah untuk menggantikan UU. No. 32 Tahun 1956.

Secara singkat yang dimaksud dengan desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan. Jumlah bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab birokrasi di Indonesia adalah sama diantara level pemerintah kabupaten/kota, serta diantara pemerintah propinsi. Namun dengan otonomi daerah, kewenangan daerah kabupaten atau kota kini menjadi lebih besar dibandingkan propinsi atau pusat. Bagaimana masing-masing daerah melaksanakan kewenangan tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah, dan kondisi setiap daerah.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (*rules*) *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan Pusat dan Daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah – pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Pusat ke Daerah. Artinya semakin banyak wewenang yang dilimpahkan, maka kecenderungan semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh daerah. Namun dalam pengelolaan pembiayaan tugas desentralisasi, prinsip efisiensi juga menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan. Anggaran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan atau pelayanan publik sedapat mungkin dikelola secara efisien, agar menghasilkan output yang maksimal.

Row B. Bahl (1999) mengemukakan dalam aturan yang keduabelas disebutkan bahwa desentralisasi harus memacu adanya persaingan diantara berbagai pemerintah lokal untuk menjadi pemenang (*there must be champion for fiscal decentralization*). Hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik – pemerintah lokal berlomba-lomba untuk memahami benar dan memberikan apa yang terbaik dan dibutuhkan masyarakat. Perubahan struktur ekonomi masyarakat dengan peran

masyarakat yang semakin besar, peningkatan kesejahteraan rakyat, partisipasi rakyat setempat dalam pemerintahan dan lain-lain.

Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal selalu berkorelasi dengan persoalan kebijakan fiskal nasional dalam APBN. Pengembangan konsep desentralisasi fiskal banyak tergantung kepada keputusan politik pemerintah terhadap APBN. Oleh sebab itu, kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendukung otonomi daerah juga sedikit banyak tergantung pada kebijakan APBN dan kebijakan ekonomi makro.

Sistem hubungan Pusat dan Daerah merupakan mekanisme distribusi sejumlah dana anggaran dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah. Konsep perimbangan keuangan Pusat kepada daerah dalam kerangka otonomi daerah adalah konsekuensi dari adanya tanggung jawab terhadap kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Karena itu setiap tingkatan pemerintahan berkepentingan terhadap kebijakan desentralisasi fiskal. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pusat pun masih mempunyai kewenangan pemerintahan. Artinya, kewenangan pusat bukan kewenangan yang tersisa – seperti yang diungkapkan oleh beberapa pakar tentang otonomi daerah (Saragih, 2003: 83)

2.2.4 Esensi/ Hakekat Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya DAU diharapkan dapat mengatasi kesenjangan vertikal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta kesenjangan horizontal antar Pemerintah Daerah agar terjadi pemerataan (*equality*) dalam kemampuan fiskal. Kesenjangan vertikal dan kesenjangan

horizontal tersebut terjadi sebagai akibat kesenjangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan adanya perbedaan potensi antar Pemerintah Daerah.

Terdapat perbedaan cara pandang terhadap keberadaan DAU antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Bagi Pemerintah Pusat, DAU dimaksudkan sebagai *instrument horizontal imbalance* untuk pemerataan (*equality*) atau mengisi *fiscal gap* didalam struktur keuangan daerah. Sementara itu bagi Pemerintah Daerah, DAU dimaksudkan untuk mendukung kecukupan daerah (*sufficiency*). Berdasarkan kedua pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan sementara bahwa DAU dimaksudkan sebagai *instrument horizontal imbalance* untuk pemerataan (*equality*) dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Analisa Belanja (SAB), sehingga belum dapat diketahui kebutuhan daerah secara nyata.

Hal ini sedikit berbeda dengan pendapat dari Dr. Machfud Sidik yang secara tegas menyatakan bahwa fungsi Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dengan dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai adalah dipenuhinya kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah, khususnya biaya yang bersifat tetap (*fixed cost*). Komponen biaya tetap yang harus mendapatkan perhatian adalah belanja pegawai, utamanya gaji pegawai. Pemenuhan terhadap biaya tetap tersebut merupakan alternatif kebijakan yang layak dipertimbangkan sebagai kebijakan yang bersifat tradisional, hingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Analisa Belanja (SAB).

Konsep formula Dana Alokasi Umum (DAU) 2002 ditetapkan berdasarkan *fiscal gap*, yaitu pengalokasiannya bertolak dari pemikiran adanya kesenjangan antara kebutuhan fiskal dan kemampuan/potensi fiskal daerah, sehingga selisih antara kebutuhan dan kemampuan dipenuhi melalui Dana Alokasi Umum. Secara umum kriteria Dana Alokasi Umum harus meliputi beberapa aspek:

1. Menggunakan pendekatan kesenjangan fiskal
2. Dapat dipertanggungjawabkan secara akademis
3. Bersifat Umum
4. Perhitungan dapat dilakukan oleh daerah
5. Mudah dimengerti publik
6. Formula dana alokasi umum propinsi dapat berbeda dengan kabupaten/kota (Soekarwo, 2003: 17)

2.2.5 Prinsip/ Azas Dana Alokasi Umum

Desentralisasi Fiskal

Pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan amanat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan desentralisasi kewenangan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan umum yang lebih berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip *money follow function*, maka pelaksanaan desentralisasi kewenangan tersebut harus diikuti dengan desentralisasi fiskal. Sekalipun demikian, derajat desentralisasi kewenangan dan desentralisasi fiskal tidak selalu berada pada tingkat yang sama sebab hal tersebut sangat tergantung pada kondisi suatu negara. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa derajat desentralisasi fiskal sangat tergantung pada kebutuhan terhadap pelaksanaan desentralisasi kewenangan. Dengan kata lain bahwa efektifitas pelaksanaan desentralisasi kewenangan sangat tergantung pada dukungan yang diberikan melalui desentralisasi fiskal.

Terdapat tiga bentuk pokok desentralisasi fiskal ditinjau dari derajat kemandirian pengambilan keputusan, yaitu: "pertama, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintahan pusat ke instansi vertikal di daerah yang berada dalam lingkungan pemerintahan pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke Pemerintah Daerah. Kedua delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan

dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah” (Bird, Richard M, dan Vaillancourt, Francois, 2000).

Dalam pelaksanaannya ketiga variasi bentuk desentralisasi fiskal dapat dilaksanakan dalam tingkat yang berbeda atau dilakukan secara bertahap, yaitu mulai dari tingkat yang paling sentralistis mengarah pada tingkat desentralisasi yang dianggap paling ideal. Dinyatakan pula bahwa desentralisasi fiskal terutama mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. *Self financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui retribusi daerah;
- b. *Confinancing* atau *coproduction*, dimana pengguna jasa publik berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja;
- c. Peningkatan PAD melalui penambahan kewenangan pengenaan pajak daerah terutama pajak property, PBB, pajak penjualan (PPn), pajak penghasilan (PPh orang pribadi), atau berbagai jenis retribusi daerah.

Transfer dari Pemerintah Pusat terutama berasal dari sumbangan umum (DAU), sumbangan khusus (DAK), sumbangan darurat (dana darurat) dan bagi hasil pajak/bukan pajak.

Desentralisasi fiskal di Indonesia masih berada dalam tingkat yang sentralistis, sebab “... hampir tiga perempat (75%) total pengeluaran negara secara langsung ditentukan pusat, dan lainnya sebesar 10 persen ditransfer ke pemerintah daerah. Namun, secara efektif penggunaannya dikontrol oleh pusat. Bahkan masih tersisa, sebesar 15 persen dari total pengeluaran negara, juga banyak dipengaruhi pusat melalui proses perencanaan sampai dengan persetujuan APBN. Sehingga secara keseluruhan, distribusi dari tanggung jawab pengeluaran anggaran masih tetap sangat sentralistis” (Shah, Anwar, 2000).

Kondisi ini sangat terkait dengan adanya kondisi bahwa sebagian besar kewenangan masih merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun

1999 memberikan kewenangan yang lebih besar pada Pemerintah Daerah, namun hal tersebut belum sepenuhnya mendapat dukungan yang memadai dari konsep implementasi desentralisasi fiskal. Kurangnya dukungan tersebut nampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, terlebih lagi untuk kegiatan pembangunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak dapat ditingkatkan secara optimal sesuai dengan tuntutan semangat otonomi. Fenomena ini merupakan hal yang wajar sebab "... jika suatu negara mendesentralisasikan tanggung jawab pengeluaran yang lebih besar dibanding sumber-sumber yang tersedia, maka tingkat pelayanan akan menurun" (Bird, Richard M, dan Vaillancourt, Francois, 2000).

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Didalam konteks yang lebih sederhana Dana Alokasi Umum ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi agar kegiatan birokrasi dan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, dimana hal tersebut berupa kebutuhan yang bersifat biaya tetap (*fixed cost*)

Block Grant

Pembagian dana bagian daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil (*by origin*) cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah, dimana daerah yang mempunyai potensi pajak dan SDA yang besar hanya terbatas pada beberapa daerah tertentu. Peran strategis distribusi DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Pada dasarnya Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk dari transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang pemanfaatan dan

pengalokasiannya sepenuhnya merupakan kewenangan penerima transfer, yaitu pemerintah daerah. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas bagi daerah, maka Dana Alokasi Umum sebagai salah satu sumber penerimaan daerah seharusnya bersifat pendamping untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah (Soekarwo, 2003: 18)

2.2.6 Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka daerah harus melakukan upaya-upaya positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD secara positif dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan baru tanpa membebani masyarakat dan tanpa menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Upaya peningkatan PAD tersebut dipandang sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai pemberian ekonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Intensifikasi melalui upaya:
 - a. pendapatan dan peremajaan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
 - b. mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi;
 - c. mengintensifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada;
 - d. memperbaiki prasarana dan sarana pungutan yang belum memadai.
2. Penggalan Sumber-Sumber Penerimaan Baru (Ekstensifikasi)

Upaya penggalian sumber-sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Dimana penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi sebab pada dasarnya tujuan meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, upaya ekstensifikasi lebih diarahkan pada upaya mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Bagi propinsi Jawa Timur konsep pemanfaatan potensi tersebut memberikan pendapatan pada Pemerintah Pusat, sehingga daerah berhak atas sejumlah dana yang akan dipergunakan sebagai biaya pemulihan (*cost recovery*) untuk mempertahankan potensi daerah tersebut. Konsep ini dipandang tidak akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, sebab peningkatan penerimaan tersebut diperoleh dari bagian yang diterima Pemerintah Pusat. Perhitungan bagian yang diterima oleh Daerah sebagai biaya pemulihan didasarkan atas variabel-variabel yang relevan, sehingga daerah benar-benar dapat melakukan pemulihan terhadap kondisi daerah yang dimanfaatkan.

3. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini bahwa pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan hak dari pada kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam perkembangan fenomena membayar pajak telah menjadi hak dari masyarakat sebagai suatu hak tentunya masyarakat menuntut kualitas layanan yang baik dari pemerintah, kualitas layanan yang baik

tentunya diarahkan kepada layanan untuk kepentingan umum. Wujud dari layanan yang baik kepada masyarakat dan memuaskan berupa:

- a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan layanan yang cepat;
- b. Memperoleh pelayanan secara wajar;
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan;
- d. Pelayanan yang jujur dan terus terang.

Pada akhirnya diharapkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang akan didistribusikan kembali pada masyarakat dalam wujud berupa pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Soekarwo, 2003: 73)

2.2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Gambaran mengenai keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahun anggaran baik tingkat I maupun tingkat II. Sumber penerimaan Daerah tingkat II dalam APBD dirinci menjadi : (1) Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas, dan penerimaan lainnya; (2) bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah daerah tingkat I; (3) sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Pusat Dati I; (4) penerimaan pembangunan (pinjaman daerah); dan (5) sisa anggaran tahun sebelumnya.

Keuangan daerah adalah subsistem dari keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBD (Talaohu, 1998: 62). Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah daerah agar dapat melakukan pengelolaan dan pengendalian atas kegiatan ekonomi daerah baik untuk mengoptimalkan penggalan potensi

sumber-sumber penerimaan daerah maupun untuk meningkatkan produktivitas dan peranan sektor swasta di daerah (Mlaskun, 1996: 60)

2.2.8 Derajat Otonomi Fiskal Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Keuangan daerah sebagai alat fiskal Pemerintah Daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan, dan menciptakan stabilitas ekonomi selain stabilitas politik. Peranan keuangan daerah makin penting, selain karena keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena makin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat daerah. Selain itu peranan keuangan daerah yang makin meningkat akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

PAD sering dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri, khususnya pengeluaran rutin, oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah. Peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mendukungnya, salah satu faktor penting adalah keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi sumber-sumber PAD itu sendiri (Kristiadi, 1992: 38). Untuk lebih mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merata di seluruh daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diturunkan lima kebijaksanaan pokok dibidang keuangan daerah: (1) kebijaksanaan untuk peningkatan PAD, khususnya yang bersumber pajak dan retribusi daerah, selain meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak secara optimal, subsidi dan bantuan, serta pinjaman kepada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga Pemerintah Daerah dapat makin mampu mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan

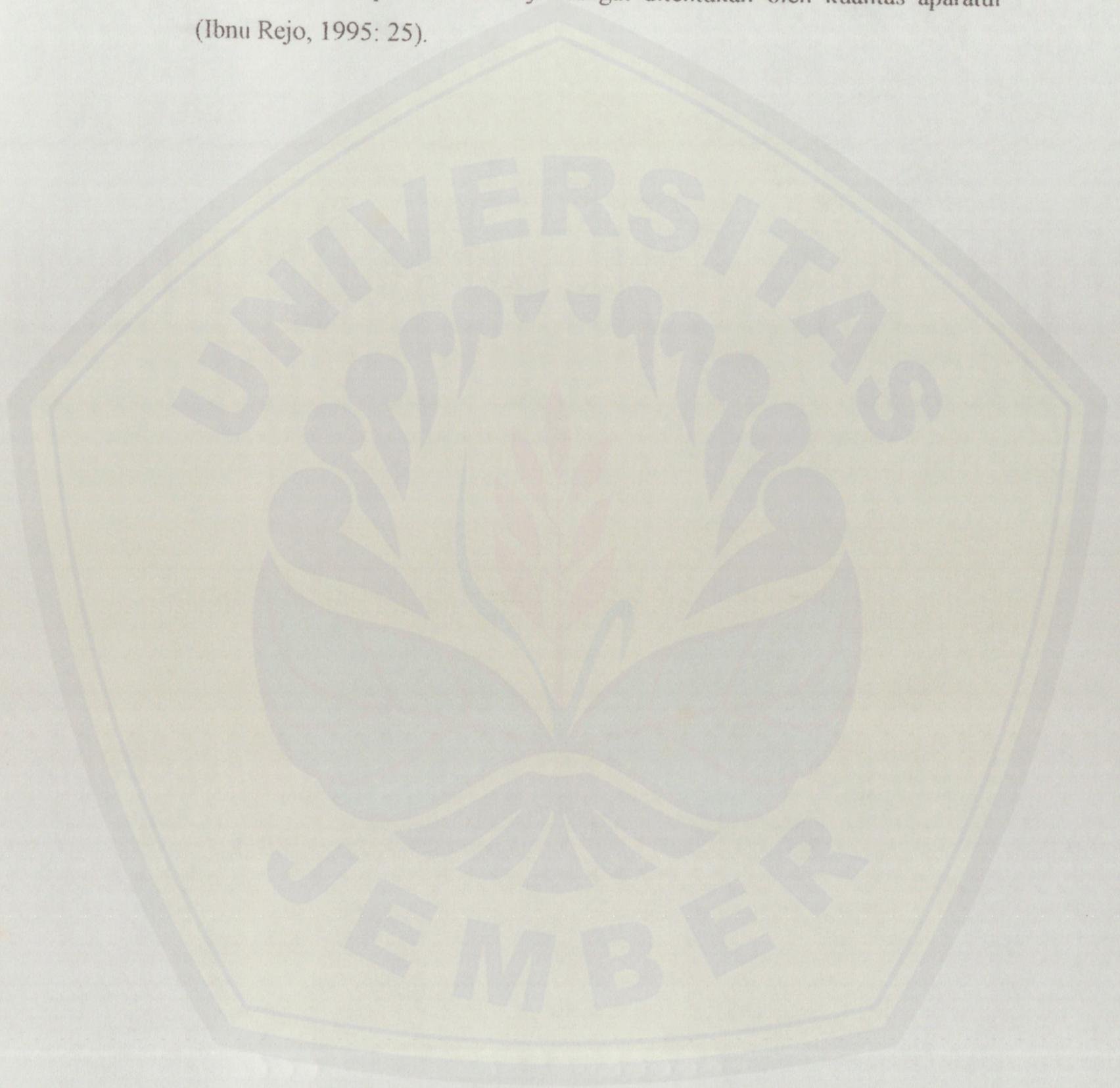
pembangunan daerah; (2) kebijaksanaan di bidang pengeluaran Pemerintah Daerah pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih baik, memperluas kesempatan kerja, mendorong usaha pemerataan, mendorong sektor swasta, membantu pengusaha lemah, serta meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pariwisata; (3) peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi; (4) peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah; (5) kebijaksanaan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah, baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.

Menurut (Davey, 1998) bahwa hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluaran-pengeluarannya adalah tidak langsung. Menurut pandangan ini, yang penting bagi otonomi daerah adalah mereka mempunyai sumber pendapatan dan elastis, tidak tergantung asal dana tersebut, dan mempunyai keleluasaan terutama dalam menggunakan dana bagi kepentingan masyarakat daerah didalam batas-batas yang ditentukan perundang-undangan.

Sementara itu (Booth, 1993: 132) menyatakan kemandirian fiskal daerah tidak akan menjadi kenyataan kalau pusat menguasai sebagian besar sumber dana, sebaliknya yang terjadi justru peningkatan ketergantungan anggaran Daerah kepada Pusat, untuk maksud ini maka dipandang perlu mendorong Pemerintah Daerah agar lebih keras berupaya meningkatkan pendapatan.

Berkaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya PAD maka kebijakan yang perlu ditempuh menurut (Kamaludin, 1984: 85) dan (Lains, 1985: 55) adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan PAD akan dapat lebih berperan. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini sedangkan kebijakan dan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa mencari dan menggali

sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber akan sangat tergantung pada kreatifitas aparatur Pemerintah Daerah untuk mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasil sumber PAD dan kreatifitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur (Ibnu Rejo, 1995: 25).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan di wilayah Pemerintahan Kota Kediri ini adalah eksplanatory yaitu suatu penelitian untuk mencari pola hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas (Singarimbun dan Effendi, 1995: 15). Dalam hal ini yang dicari adalah pola hubungan antara Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Pemerintah Kota Kediri dengan Bantuan Pemerintah Pusat.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang diteliti yaitu Indeks Kemampuan Rutin (IKR), Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat terhadap (DOF) Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan Tahun Anggaran 2003.

3.1.3 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pelaksana Pembangunan Kota (Bappeko), Bagian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di wilayah Pemerintahan Kota Kediri.

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mencatat data yang diperoleh dari Badan Pelaksana Pembangunan Kota (Bappeko), Bagian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pendapatan Daerah di wilayah Pemerintahan Kota Kediri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk times series mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991 sampai dengan Tahun Anggaran 2003.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Analisis Proporsi

1. Untuk mengetahui seberapa besar Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Pemerintah Kota Kediri dirumuskan sebagai berikut (Esmara, 1986: 226).

$$IKR = \frac{JumlahPAD}{JumlahPengeluaranRutinDaerah} \times 100\%$$

Dimana :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PAD : Pendapatan Asli Daerah

Dengan Kriteria:

IKR \geq 100% : suatu daerah telah mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin dengan PADnya

IKR $<$ 100% : suatu daerah belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin dengan PADnya

2. Untuk mengetahui Otonomi Fiskal Daerah digunakan ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal daerah yaitu dengan apa yang dinamakan sebagai "*administrative independency ratio* antara PAD dengan total penerimaan APBD, (tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat)" Radianto (1996: 47).

$$DOF = \frac{PAD}{APBD - Transferdaripemerintahpusat} \times 100\%$$

Dimana :

DOF : Derajat Otonomi Fiskal Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Transfer dari Pemerintah Pusat (Pemsat) : DAU, DAK, sumbangan darurat (dana darurat) dan dana bagi hasil pajak/ bukan pajak (Soekarwo, 2003: 20).

3.3.2 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Pemerintah Kota Kediri pada Tahun Anggaran 1990/1991-2003, digunakan regresi linier sederhana. (Gujarati, 1995: 34)

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

Yang dikonversikan dalam penelitian ini dimana:

Y_i : Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

β_0 : Konstanta Derajat Otonomi Fiskal (PAD) Pada Saat Variabel independent adalah 0

β_1 : koefisien regresi variabel X_1

X_1 : Bantuan Pemerintah Pusat (Dalam Rupiah)

u_i : Kesalahan Pengganggu

3.3.3 Uji Statistik

Koefisien Determinasi (r^2) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat (X_1) terhadap Derajat Otonomi Fiskal (Y) Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003 (Dajan, 1986: 329)

Nilai R^2 dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{b1(\sum x_1 y_1) + b2(\sum x_2 y_2)}{\sum y_1^2}$$

Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1

$R^2 = 0$, berarti tidak ada hubungan antara X dan Y

$R^2 = 1$, berarti regresi tepat atau sempurna

Jika nilai R^2 semakin mendekati 1, maka semakin tepat garis regresi untuk mewakili data hasil observasi dan sebaliknya.

a. Uji Statistik F

Untuk menguji tingkat signifikansi hubungan seluruh Koefisien Regresi variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan uji koefisien serentak dengan perumusan sebagai berikut (Supranto, 1995; 268).

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (K - 1)}{(1 - R^2) / (N - K)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien Determinasi

K = Banyaknya Variabel

N = Banyaknya Data

Kriteria pengujian :

$H_0 : b_1 = 0$, berarti variabel bebas secara bersama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat;

$H_0 : B_1 \neq 0$, berarti variabel bebas secara bersama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Pengambilan keputusan

1. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, pada taraf signifikansi yang ditentukan berarti hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_1) diterima;

2. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, pada taraf signifikansi yang ditentukan berarti hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_1) ditolak.

b. Uji Statistik t

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y), artinya pengujian regresi secara parsial atau terpisah yang bertujuan untuk mengetahui kuat tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung.

Keputusan untuk menolak atau menerima hipotesa nol, dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada derajat bebas $df = n - k - 1$ dan tingkat signifikansi yang ditentukan. Secara tepat dapat diformulasikan sebagai berikut (Supranto, 1995: 132)

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$$

Dimana :

b_i = koefisien regresi dari X_i

S_{b_i} = standar error / deviasi dari b_i

Kriteria Pengujian :

1. $H_0 : b_i = 0$, berarti tidak ada pengaruh secara parsial variabel bebas (X_i), terhadap variabel terikat (Y_i);
2. $H_0 : b_i \neq 0$, berarti ada pengaruh secara parsial variabel bebas (X_i), terhadap variabel terikat (Y_i)

Pengambilan Keputusan;

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka hipotesa nol (H_0) ditolak dan hipotesa alternatif (H_1) diterima;
2. $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka hipotesa nol (H_0) diterima dan hipotesa alternatif (H_1) ditolak.

3.3.3 Uji Ekonometrik

a. Uji Autokorelasi

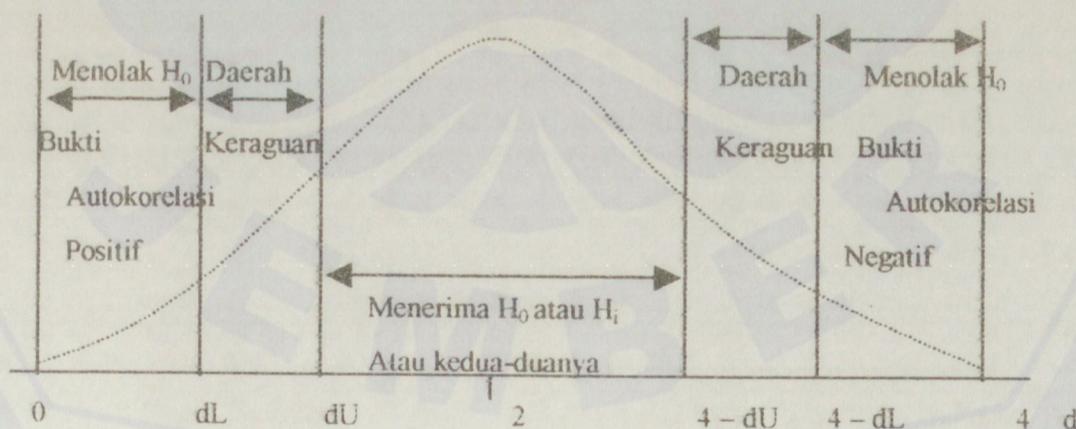
Alat uji ekonometrik yang digunakan untuk menguji suatu model, apakah antara variabel rambang (pengganggu) masing-masing saling mempengaruhi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, digunakan pendekatan Durbin Watson (d) sebagai berikut (Supranto, 1995: 109):

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^n e_t^2}$$

Kriteria pengujian :

1. Pengujian dinyatakan dengan hipotesa nol (H_0) yang menyatakan tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif;
2. Sedangkan hipotesa alternatif (H_1) yang menyatakan ada autokorelasi positif atau negatif.

Untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan pada uji ini, secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut : (Gujarati, 1995 : 216)



Gambar 1: Statistik d Durbin Watson

Pengambilan Keputusan :

1. jika $d < d_L$, maka H_0 ditolak, ada korelasi positif
2. jika $d_L < d < d_U$, daerah tanpa keputusan
3. jika $d_U < d < (4 - d_L)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terjadi autokorelasi
4. jika $4 - d_U < d < 4 - d_L$, daerah tanpa keputusan
5. jika $d < 4 - d_L$, maka H_0 ditolak, berarti ada autokorelasi negatif
6. d_L : Durbin Watson table batas bawah
7. d_U : Durbin Watson table batas atas

b. Uji Heteroskedastisitas

Alat uji ekonometrik yang digunakan untuk model mengenai varian rambang (pengganggu) dari masing-masing variabel bebas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model digunakan *Uji Park* yang dilakukan dengan dua tahap sebagai berikut (Supranto, 1995: 157) :

1. Membuat regresi dengan menggunakan Ordinary Least Square, kemudian melakukan regresi memperhatikan adanya Heteroskedastisitas, sehingga dari regresi ini kita peroleh e_i ,
2. Membuat regresi dengan menganggap nilai residual (e_i) sebagai variabel terikat dengan rumus sebagai berikut :

$$\ln e_i^2 = \ln \alpha^2 + \beta \ln X_i + v_i$$

Pengambilan Keputusan :

1. Jika $-t_{\alpha/2} < t_{hitung} < t_{\alpha/2}$, maka dalam model tidak terjadi heteroskedastisitas;
2. Jika $-t_{\alpha/2} > t_{hitung} > t_{\alpha/2}$, maka dalam model terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel bebas lainnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai t_{hitung} , F_{hitung} dan R^2 . Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan meregresikan setiap variabel bebas atas variabel bebas lainnya dan menghitung koefisien determinasi dalam regresi variabel bebas atas sisa variabel bebas lainnya. Multikolinieritas kemungkinan terjadi apabila nilai R^2 berkisar antara 0,7 sampai 1 dan F_{hitung} bernilai tinggi, sedangkan nilai t_{hitung} banyak yang tidak signifikan (Gujarati, 1995: 337).

3.4 Definisi Variabel Operasional

Definisi variabel operasional dimaksudkan untuk menjelaskan atau menerangkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian berdasarkan teori atau pengalaman-pengalaman empiris. Adapun variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Otonomi fiskal yang dimaksudkan disini adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal daerah adalah menggunakan apa yang dinamakan sebagai "*administrative independency ratio*" yaitu rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD (tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat).

Bantuan Pemerintah Pusat merupakan bantuan yang digunakan untuk mengamankan pengeluaran pemerintah daerah yang terbesar yaitu gaji pegawai daerah otonom. Bantuan pemerintah berupa subsidi daerah otonom (SDO) dan bantuan pembangunan sedangkan sejak diberlakukan otonomi daerah No. 22 dan 25 tahun 1999 bantuan tersebut berbentuk DAU dan DAK.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Kediri

4.1.1 Letak Geografis

Kota Kediri terletak pada $111^{\circ}.45 - 112^{\circ}.03$ Bujur Timur dan $7^{\circ}.45 - 7^{\circ}.55$ Lintang Selatan, dengan ketinggian tempat 67 m diatas permukaan laut.

Batas wilayah administrasi:

Seluruh wilayah Kota Kediri dibatasi oleh wilayah Kabupaten Kediri yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gampengrejo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wates dan Gurah
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Grogol dan Semen

Luas Wilayah Kota Kediri

Tabel 1 : Luas wilayah Kota Kediri yang dirinci menurut Kecamatan, 2003

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Mojooroto	24,6
2	Kota	14,9
3	Pesantren	23,9
	Jumlah	63,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, tahun 2003

Secara administratif Kota Kediri termasuk dalam wilayah kerja badan koordinasi wilayah II Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, yang membawahi 3 wilayah kecamatan, 46 kelurahan, 293 RW dan 1.329 RT.

- a. Kecamatan Pesantren terdiri – dari 15 kelurahan
- b. Kecamatan Kota terdiri – dari 17 kelurahan
- c. Kecamatan Mojooroto terdiri – dari 14 kelurahan

4.1.2 Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kota Kediri pada tahun 2001 tercatat 238.955 jiwa yang terdiri - dari laki-laki 117.278 jiwa dan perempuan 121.677 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.769/Km².

Mata Pencaharian penduduk menurut sektor ekonomi/lapangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	4.620 jiwa	(4,15%)
2. Pertambangan dan Penggalian.....	309 jiwa	(0,28%)
3. Industri Pengolahan.....	30.488 jiwa	(27,39%)
4. Listrik, Gas dan Air Minum.....	308 jiwa	(0,28%)
5. Bangunan/Konstruksi	4.540 jiwa	(4,02%)
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	9.960 jiwa	(24,22%)
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7.944 jiwa	(7,14%)
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.....	1.408 jiwa	(1,26%)
9. Jasa-jasa lain	34.727 jiwa	(31,20%)

Dari sembilan macam lapangan usaha tersebut ternyata penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan cukup dominan yaitu mencapai 27,39% disamping sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 24,22%.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kediri berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Syah. Beberapa tahun paska pemberlakuan UU. No. 22 tahun 1999 dan UU. No. 25 tahun 1999 Setiap Pemerintahan Kota/Kabupaten mulai berlomba-lomba untuk menggali potensi daerah. Hal tersebut tentu saja menyebabkan PAD meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PAD pada tahun anggaran sebelumnya.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber PADS yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah. Penerimaan dari sektor pajak selalu menempati peringkat kedua dari sumber-sumber PAD yang lainnya baik sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah. Jenis pajak di Kota Kediri mengalami penyempitan dari 14 (empat belas) jenis pajak menjadi 6 (enam) jenis pajak. Berikut ini merupakan jenis-jenis pajak yang terdapat di Kota Kediri:

Jenis-jenis pajak sebelum otonomi daerah:

1. Pajak Potong Hewan
2. Pajak Pembangunan I
3. Pajak Radio
4. Pajak Bangsa Asing
5. Pajak Pertunjukan Atas Keramaian Umum
6. Pajak Reklame
7. Pajak Anjing
8. Pajak Minuman Beralkohol
9. Pajak Kendaraan Tak Bermotor
10. Pajak Penerangan Jalan
11. Pajak Rumah Bola
12. Pajak Pendaftaran Perusahaan
13. Pajak Pengangkutan
14. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (AP)

Jenis-jenis pajak sesudah otonomi daerah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir

Untuk mengetahui bagaimanakah hasil penerimaan PAD dari sektor pajak yang mengalami penyempitan atau pengurangan jenis pajak di saat pemerintah daerah sedang genjar-gencarnya menggali sumber dana pemerintah daerah, berikut ini adalah tabel yang menyajikan penerimaan pajak.

Tabel 2 : Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan dari Pajak	Kenaikan (%)
1990/1991	Rp. 313.449.725,91	0
1991/1992	Rp. 400.639.442,58	27,82
1992/1993	Rp. 512.098.957,67	27,82
1993/1994	Rp. 528.376.506,00	3,18
1994/1995	Rp. 665.515.170,45	25,95
1995/1996	Rp. 1.308.573.446,72	96,63
1996/1997	Rp. 1.645.968.483,82	25,78
1997/1998	Rp. 1.823.983.287,72	10,82
1998/1999	Rp. 2.161.460.903,12	18,50
1999/2000	Rp. 2.332.315.858,95	7,90
2000	Rp. 2.498.037.696,77	7,11
2001	Rp. 3.264.559.054,18	30,68
2002	Rp. 5.054.136.962,00	54,82
2003	Rp. 8.441.655.549,75	67,02
Rata-rata	Rp. 2.188.380.094,27	31,08

Sumber : *Bagian Keuangan kota Kediri, tahun anggaran 1990/1991-2003*

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak setelah otonomi daerah mengalami kenaikan yang cukup besar, rata-rata penerimaan pajak selama periode anggaran 1990/1991-2003 senilai Rp. 2.188.380.094,27 dan kenaikan penerimaan rata-rata pada setiap tahun anggaran mencapai 31,08%. Hal ini berarti bahwa adanya penyempitan pajak tidak berarti menurunkan penerimaan pajak. Dari penerimaan yang diperoleh memberikan indikasi bahwa peningkatan pajak tidak harus dengan ekspansi pajak (memperbanyak jenis pajak) namun yang lebih efektif adalah intensifikasi pengelolaan pajak.

Sumber penerimaan pajak yang kedua adalah retribusi daerah. Jenis retribusi daerah juga mengalami penyempitan yaitu dari 37 (tiga puluh tujuh) jenis menjadi 22 (dua puluh dua) jenis pajak. Berikut ini merupakan uraian

jenis pajak tersebut sebelum dan sesudah otonomi daerah yang dilaksanakan pada 1 Januari 2001.

Jenis-jenis retribusi sebelum otonomi daerah:

1. Uang Leges
2. Uang Dispensasi Angkutan
3. Uang Perparkiran
4. Uang Pemeriksaan/Pembantaian
5. Uang Sewa Pemakaian Tanah
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Uang Atas Pemakaian Tanah
8. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan mayat
9. Uang Pengujian Kendaraan Becak (PKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tak Bermotor (STNKTB)
10. Stasiun Bus dan Taxi
11. Rumah Sakit dan Balai Pengobatan
12. Tempat Rekreasi
13. Pasar
14. Pemeriksaan Susu
15. Pemeriksaan Daging dan Ternak
16. Biaya Kier Babi
17. Pemakaian Mobil Ambulance dan Jenazah
18. Penerimaan Hasil Pelayanan Penderita Peserta PT. ASKES Indonesia.
19. Penerimaan Pemberian Ijin Usaha dan Ijin Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
20. Penerimaan Dinas Kesehatan dan Puskesmas
21. Retribusi Kebersihan
22. Penerimaan dari Ijin Usaha Angkutan Kendaraan Umum.
23. Penerimaan dan Sewa Toko
24. Penerimaan Sewa Tennis Ban
25. Penerimaan Sewa Rumah

26. Penerimaan Uang Sewa Landasan Mesin Cetak.
27. Penerimaan Usaha Pemotongan Unggas dan Peredaran Daging Unggas
28. Penerimaan dari Penyelenggaraan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Susunan Keluarga (KSK).
29. Penerimaan dari Ijin Usaha Perbengkelan Kendaraan Bermotor.
30. Penerimaan Jasa Medik Dan Anasthesi
31. Penerimaan Sewa Wales
32. Penerimaan dari Penitipan Sepeda
33. Penerimaan dari Sewa Gedung
34. Sewa Bedak
35. Pemasangan Papan Nomor Rumah
36. Penerimaan Pemeriksaan Kesehatan Ternak.
37. Kartu Ternak Dan Jual Beli Ternak di Pasar Hewan

Jenis-jenis pajak sesudah otonomi daerah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan.
3. Retribusi Penggajian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pelayanan
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
10. Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan
11. Retribusi Terminal
12. Retribusi Tempat Khusus Parkir
13. Retribusi Penyedotan Kakus/ WC
14. Retribusi Rumah Potong Hewan

15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
16. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
17. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
18. Retribusi Ijin Gangguan
19. Retribusi Ijin Trayek
20. Retribusi di Bidang Industri dan Perdagangan
21. Retribusi Distribusi Pelayanan Obat
22. Retribusi Ijin Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Penerimaan retribusi juga mengalami kenaikan yang cukup tajam meskipun telah mengalami penyempitan jenis pajak. Penerimaan dari retribusi sebelum otonomi daerah selalu menduduki peringkat atas dari sumber-sumber PAD lainnya. Hasil retribusi kota Kediri dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 : Penerimaan Retribusi Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi	Kenaikan (%)
1990/1991	Rp. 1.195.503.521,00	0
1991/1992	Rp. 1.342.102.071,50	12,26
1992/1993	Rp. 1.492.264.469,00	11,19
1993/1994	Rp. 1.803.342.659,00	20,85
1994/1995	Rp. 1.943.096.298,48	7,75
1995/1996	Rp. 1.938.578.922,76	-0,23
1996/1997	Rp. 2.299.870.797,25	18,64
1997/1998	Rp. 2.577.411.019,50	12,07
1998/1999	Rp. 4.593.784.510,37	78,23
1999/2000	Rp. 1.896.620.112,25	-58,71
2000	Rp. 1.735.212.349,70	-8,51
2001	Rp. 3.046.711.112,00	75,58
2002	Rp. 3.780.489.680,00	24,08
2003	Rp. 4.299.333.681,00	13,72
Rata-rata	Rp. 2.424.594.371,70	15,92

Sumber : Bagian Keuangan kota Kediri, Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 1995/1996, 1999/2000, dan 2000 memberikan kenaikan yang negatif, hal ini berarti bahwa pada tahun anggaran tersebut tidak terjadi kenaikan tetapi sebaliknya

malah terjadi penurunan. Penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun anggaran 1999/2000 yang mencapai 58%. Dan pada awal pelaksanaan otonomi daerah kenaikan dari hasil pajak begitu tajam yaitu 75,58%. Penerimaan rata-rata dari retribusi selama periode tahun anggaran 1990/1991-2003 mencapai Rp. 2.424.594.371,70 dan rata-rata kenaikan mencapai 15,92%.

Penerimaan ketiga dari PAD adalah Laba Usaha Daerah. Penerimaan dari sektor ini menduduki peringkat ketiga dari sumber PAD lainnya bahkan ketika otonomi daerah dilaksanakan hasil dari penerimaan PAD justru memiliki peringkat yang terakhir. Laba usaha daerah di kabupaten Kediri pada awalnya hanya diperoleh dari hasil obligasi pada Bank Jatim dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2002 telah membentuk lembaga perbankan/keuangan, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Kediri berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2002. Dengan berdirinya BPR tersebut sangat diharapkan akan menopang penerimaan PAD. Hasil penerimaan PAD selama tahun 1990/1991-2003 dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 : Penerimaan Hasil Usaha Daerah

Tahun Anggaran	Nilai	Prosentase (%) kenaikan
1990/1991	Rp. 14.487.507,50	
1991/1992	Rp. 29.357.041,11	102,64
1992/1993	Rp. 29.804.617,50	1,52
1993/1994	Rp. 26.347.145,54	-11,60
1994/1995	Rp. 27.985.562,06	6,22
1995/1996	Rp. 29.782.080,32	6,42
1996/1997	Rp. 32.630.373,85	9,56
1997/1998	Rp. 46.080.092,11	41,22
1998/1999	Rp. 32.630.373,85	28,03
1999/2000	Rp. 50.000.000,00	-15,25
2000		
2001		
2002	Rp. 157.056.846,72	
2003	Rp. 108.949.072,34	-30,63
Rata-rata	Rp. 43.676.899,52	2,93

Sumber: *Bagian Keuangan kota Kediri, 1990/1991-2003*

Berdasarkan tabel 4 bahwa penerimaan laba usaha daerah lebih sedikit dibandingkan sumber PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah mencapai milyaran rupiah sejak tahun anggaran 1990/1991. laba usaha daerah di era otonomi pun belum bisa mencapai hasil sebagaimana pajak dan retribusi daerah. Hal ini karena hasil dari laba usaha daerah hanya diperoleh dari obligasi bank pembangunan daerah (Bank Jatim) dan PDAM yang perkembangannya terasa stagnan, belum terlihat adanya kompetisi. Padahal untuk menghidupkan suatu usaha daerah (milik pemerintah) tidak harus menunggu diprivatisasi karena sistem usaha yang bersaing bisa dimiliki oleh siapa pun dengan menjalankan manajemen yang bagus tentu tidak akan kalah dengan swasta. Penerimaan dari BPR Kota Kediri yang diharapkan mampu menopang PAD dari laba usaha daerah ternyata belum dibukukan sebagai penerimaan pada tahun anggaran 2003.

Penerimaan yang keempat adalah dari lain-lain PAD yang syah. Hasil penerimaan dari Lain-lain PAD yang syah memiliki peringkat pertama dari sumber PAD lainnya, padahal sebelum otonomi daerah penerimaan dari Lain-lain PAD yang syah selalu menduduki peringkat terakhir. Lain-lain PAD yang syah diperoleh dari rumah sakit unit swadana daerah, jasa giro, hasil penjualan barang milik daerah dan sumbangan pihak ketiga. Rumah sakit unit swadana adalah kontributor terbesar dari hasil penerimaan Lain-lain PAD yang syah. Penerimaan dari RS. Unit Swadana pada tahun anggaran 2002 mencapai Rp. 6.963.882.156,07 dari seluruh total penerimaan lain-lain PAD yang syah yang mencapai Rp. 8.095.362.275,07 dan pada tahun anggaran 2003 penerimaan RS. Unit Swadana senilai Rp. 10.937.763.380,00 dari seluruh penerimaan Lain-lain PAD yang syah senilai Rp.20.152.018.499,96. kontributor terbesar kedua setelah RS. Unit Swadana adalah penerimaan lain-lain yang mencapai Rp. 7.757.000.000,00 dan kontributor terhadap penerimaan lain-lain PAD yang syah lainnya adalah Jasa Giro, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah dan sumbangan pihak ke-3. Berikut ini merupakan tabel hasil penerimaan dari Lain-lain PAD yang Syah.

Table 5 : Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Tahun Anggaran	Nilai	Prosentase (%) kenaikan
1990/1991	Rp. 33.688.026,91	
1991/1992	Rp. 17.743.040,34	-47,33
1992/1993	Rp. 69.902.513,47	293,97
1993/1994	Rp. 44.115.017,82	-36,89
1994/1995	Rp. 68.222.606,56	54,65
1995/1996	Rp. 78.182.423,29	14,60
1996/1997	Rp. 243.981.223,45	212,07
1997/1998	Rp. 135.043.015,88	-44,65
1998/1999	Rp. 638.763.097,25	373,01
1999/2000	Rp. 3.496.574.318,04	447,40
2000	Rp. 3.637.774.987,09	4,04
2001	Rp. 7.393.250.322,48	103,24
2002	Rp. 12.255.293.387,25	65,76
2003	Rp. 13.359.911.224,07	9,01
Rata-rata	Rp. 2.962.317.514,56	111,45

Sumber: Bagian Keuangan Kota Kediri, Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Hasil penerimaan pada tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan hingga 44,65%. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 1998 Indonesia dilanda krisis moneter yang mengakibatkan nilai tukar rupiah terpuruk. Dampak tersebut menyebabkan sektor riil mengalami kelesuan karena banyak perusahaan yang gulung tikar karena bahan baku mereka adalah impor, selain itu juga karena biaya produksi semakin tinggi. Setelah krisis melanda Indonesia kenaikan yang tajam terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 dengan kenaikan sebesar Rp. 638.763.097,25 dan Rp. 3.496.574.318,04. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah penerimaan pajak mencapai Rp. 7.393.250.322,48 meningkat 103,24% dari tahun sebelumnya. Tingkat kenaikan pada tahun anggaran 2003 sangat sedikit yaitu mencapai 9,01 %. Peningkatan yang sangat kecil, sedangkan disisi lain tingkat kebutuhan yang terus meningkat merupakan hal yang harus dicari solusinya agar peningkatan dapat seiring dengan perkembangan kebutuhan yang terus meningkat.

Penerimaan total dari seluruh bagian-bagian PAD yang diuraikan diatas dan seberapa jauh tingkat kontribusi dari masing-masing sub PAD

diatas terhadap total penerimaan PAD dapat dilihat melalui tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Prosentase (%)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1990/1991	1.497.858.000,00	0	1.557.128.781,32	0
1991/1992	1.729.942.100,00	15,49	1.789.841.595,53	14,94
1992/1993	2.012.820.398,00	16,35	2.104.070.557,64	17,56
1993/1994	2.456.931.950,00	22,06	2.402.181.328,36	14,17
1994/1995	2.947.527.940,00	19,97	2.704.819.637,09	12,60
1995/1996	3.314.756.131,00	12,46	3.355.116.873,09	24,04
1996/1997	4.138.859.390,00	24,86	4.222.450.878,37	25,85
1997/1998	4.744.934.340,00	14,64	4.582.517.415,21	8,53
1998/1999	6.817.498.418,00	43,6	7.453.004.764,98	62,64
1999/2000	7.135.177.644,00	4,66	7.775.510.289,24	4,33
2000	6.165.901.085,00	-13,58	7.871.025.033,56	1,23
2001	11.226.936.220,50	82,08	13.704.520.488,66	74,11
2002	15.660.194.825,07	39,49	21.246.976.875,97	55,04
2003	30.452.333.897,30	94,46	26.209.849.527,16	23,36
Rata-rata	7.164.405.167,06	28,97	7.641.358.146,16	26,03

Sumber: Bagian Keuangan Kota Kediri, Tahun Anggaran 1990/1991-2003.

Berdasarkan tabel 6 penerimaan PAD setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 mencapai peningkatan yang cukup besar yaitu 74%. Peningkatan yang terlihat begitu besar sesungguhnya memiliki nilai riil secara ekonomis yang relatif sama atau bahkan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan nilai rupiah pada waktu itu sangat terpuruk karena dampak krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun anggaran 1997/1998. Krisis yang terjadi pada tahun pada tahun 1997 tersebut menyebabkan penerimaan dari PAD tahun 1997 mengalami penurunan hingga 17% dari tahun 1996. Dampak krisis moneter yang masih begitu terasa hingga akhir tahun 2000. Hal ini terlihat pada peningkatan PAD dari tahun 1998 ke tahun 1999 yang mencapai minus 58% dan dari tahun 1999 ke tahun 2000 juga masih minus 1,23% dari tahun 1999 yang hanya memiliki prosentase kenaikan sebesar 4,33%.

Realisasi dari penerimaan PAD rata-rata melebihi dari target yang diinginkan kecuali pada tahun anggaran 1993/1994, 1994/1995, 1997/1998

dan tahun anggaran 2003. Pada tahun anggaran 2003 penerimaan PAD jauh dari yang ditargetkan. Target penerimaan PAD tahun anggaran 2003 Rp. 30.452.333.897,30 dan realisasinya mencapai Rp. 26.209.849.527,16. Realisasi penerimaan yang jauh dari target yang diharapkan merupakan indikasi bahwa upaya peningkatan PAD belum optimal atau adanya faktor-faktor lain yang menghambat penerimaan PAD. Rata-rata kenaikan PAD selama tahun anggaran 1990/1991-2003 adalah 15,92%.

Undang-Undang otonomi daerah yang digulirkan pada tahun 1999 telah mengaburkan perhatian Pemerintah Daerah terhadap krisis moneter yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Meskipun pemerintah banyak memiliki program yang dijalankan untuk mengurangi beban ekonomis yang dirasakan masyarakat, perhatian Pemerintah Daerah telah banyak tercurahkan untuk membuat strategi peningkatan penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan. Para anggota DPRD telah disibukkan dengan bagaimana menyusun perda yang mengatur penggalan dana dari masyarakat baik berupa pajak maupun retribusi daerah.

Upaya peningkatan penerimaan dari PAD telah nyata diperoleh secara maksimal setelah pemberlakuan Undang-Undang otonomi daerah pada awal tahun 2001. Dengan kenaikan penerimaan yang mencapai 74,11% pada tahun 2001, 55,04% pada tahun 2002 dan 23,36% pada tahun 2003. Upaya peningkatan penerimaan dari PAD telah diatur oleh pemerintah agar tidak membebani atau merugikan masyarakat secara ekonomis. Dalam rangka peningkatan penerimaan dari PAD pemerintah Kota Kediri memakai manajemen efektifitas terhadap pengenaan pajak maupun retribusi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyempitan jenis pajak dimana sebelum otonomi daerah tahun 2001 terdapat 14 jenis pajak dan setelah pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001 hanya terdapat 6 jenis pajak. Begitupun dengan retribusi daerah, semula terdapat 37 jenis retribusi daerah dan setelah pelaksanaan otonomi daerah hanya terdapat 22 jenis retribusi.

Adanya penyempitan jenis pajak dan retribusi daerah tidak mengakibatkan penurunan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi

daerah, justru sebaliknya malah meningkat. Peningkatan tersebut disebabkan pemerintah bertindak tegas terhadap wajib pajak dengan mengenakan sanksi hukuman dan atau denda bagi yang terlambat membayar atau berusaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Sedangkan retribusi ditingkatkan dengan upaya pengintensifan dan pengefektifan retribusi terhadap masyarakat.

4.2.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sumber penerimaan APBD Pemerintah Kota Kediri berasal dari bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sedangkan pengeluaran digunakan untuk belanja rutin dan belanja pembangunan. Dibawah ini merupakan macam-macam pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Pemerintah Kota Kediri.

Pengeluaran Rutin :

1. Belanja DPRD
2. Belanja Kepala Daerah
3. Belanja Pegawai
4. Belanja Barang
5. Belanja Pemeliharaan
6. Belanja Perjalanan Dinas
7. Belanja Lain-lain
8. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga
9. Bantuan Keuangan
10. Pengeluaran tidak termasuk bagian lain
11. Pengeluaran tidak tersangka

Pengeluaran Pembangunan

1. Sektor Industri
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan
3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi
4. Sektor Tenaga Kerja
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.
6. Sektor Transportasi
7. Sektor Pertambangan dan Energi
8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah
9. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman
10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga.
12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Social, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.
14. Sektor Perumahan dan Permukiman
15. Sektor Agama
16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
17. Sektor Hukum
18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban
21. Sektor Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan.

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan APBD Kota Kediri yang dipergunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah berikut ini kami sajikan daftar penerimaan APBD baik dalam target maupun realisasinya.

Tabel 7: Target dan Realisasi Penerimaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Tahun Anggaran	Target Penerimaan APBD (Rp)	Perkembangan	Realisasi Penerimaan APBD (Rp)	Perkembangan
1990/1991	3.635.711.000,00		6.253.082.069,72	
1991/1992	8.431.751.669,77	131,91%	7.935.544.119,00	26,91%
1992/1993	12.255.387.209,61	45,35%	12.099.188.036,58	52,47%
1993/1994	13.001.261.292,90	6,09%	11.762.926.637,12	-2,78%
1994/1995	13.718.793.775,85	5,52%	13.507.688.027,23	14,83%
1995/1996	13.979.028.646,15	1,90%	13.761.824.431,63	1,88%
1996/1997	17.375.348.366,65	24,30%	17.065.881.978,87	24,01%
1997/1998	21.011.448.905,86	20,93%	18.668.153.770,71	9,39%
1998/1999	41.352.232.129,06	96,81%	36.855.342.071,18	97,42%
1999/2000	70.209.056.645,12	69,78%	53.955.700.991,24	46,40%
2000	55.447.588.940,00	-21,03%	52.231.071.218,08	-3,20%
2001	145.633.974.593,30	162,65%	128.437.969.493,74	145,90%
2002	200.454.617.971,78	37,64%	188.749.300.359,30	46,96%
2003	221.242.622.677,47	10,37%	241.706.953.130,33	28,06%
rata-rata	59.839.201.701,68	45,56%	57.356.473.309,62	37,56%

Sumber: Bagian Keuangan Pemkot Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Target penerimaan APBD Kota Kediri dalam realisasinya tidak menyimpang begitu jauh, hampir seluruh target yang diinginkan dapat dicapai. Pada beberapa tahun anggaran target penerimaan APBD dalam realisasinya justru lebih besar yaitu pada tahun anggaran 1990/1991-2003 dalam realisasinya justru hampir mencapai dua kali lipat dari target penerimaan yang diharapkan. Pada tahun anggaran 2003, target realisasi adalah Rp. 221.242.622.677,47 dalam realisasinya mencapai Rp. 241.706.953.130,33. Angka rata-rata yang ditunjukkan pada target penerimaan APBD dan rata-rata perkembangan penerimaan APBD Kota Kediri pada setiap tahun anggaran hampir seluruhnya dapat direalisasikan hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata realisasi penerimaan APBD dan perkembangannya.

Penerimaan APBD tersebut digunakan untuk membiayai seluruh operasional pemerintahan dan menjalankan pembangunan daerah baik berupa pembangunan ekonomi maupun non ekonomi. Dalam hal ini utamanya adalah pembangunan ekonomi karena dari pembangunan ekonomi akan menciptakan distribusi pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk melihat perkembangan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8: Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Tahun Anggaran	Pengeluaran Rutin (Rp)	Perkem- bangan (%)	Pengeluaran Pembangunan (Rp)	Perkem- bangan (%)
1990/1991	3.540.680.098,22		2.712.401.971,50	
1991/1992	4.073.330.645,00	15,04	3.862.213.474,00	42,39
1992/1993	4.740.486.062,58	16,38	7.358.701.974,00	90,53
1993/1994	5.755.280.314,62	21,41	6.007.646.322,50	-18,36
1994/1995	6.319.618.393,12	9,81	7.188.069.634,11	19,65
1995/1996	7.550.540.296,20	19,48	6.211.284.135,43	-13,59
1996/1997	8.722.577.347,87	15,52	8.343.304.631,00	34,32
1997/1998	10.508.278.695,33	20,47	8.159.875.075,38	-2,20
1998/1999	25.584.735.857,03	143,47	11.270.606.214,15	38,12
1999/2000	38.000.502.449,24	48,53	15.955.198.542,00	41,56
2000	37.234.323.754,78	-2,02	14.996.747.463,30	-6,01
2001	101.528.707.070,24	172,68	26.909.262.423,50	79,43
2002	127.364.744.357,80	25,45	61.384.556.001,50	128,12
2003	154.711.962.375,84	21,47	63.650.826.950,00	3,69
rata-rata	38.259.697.694,13	40,59	17.429.335.343,74	33,67

Sumber : Bagian Keuangan Pemkot Kediri TA. 1990/1991-2003

Pengeluaran rutin APBD Kota Kediri pada setiap tahun anggaran selalu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk pembangunan. Kondisi yang demikian ini dikarenakan keterbatasan penerimaan, sehingga sebagian besar penerimaan teralokasikan untuk kebutuhan rutin. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat membiayai pembangunan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutinnya. Semakin besar pengeluaran pembangunan akan memberikan kontribusi yang lebih

besar juga terhadap penerimaan PAD, hal ini dikarenakan target pembangunan ekonomi adalah adanya implikasi terhadap peningkatan pendapatan.

Rata-rata pengeluaran rutin pada setiap tahun anggaran adalah 40,59% sedangkan pengeluaran pembangunan rata-rata 33,67%. Pengeluaran rutin pada tahun anggaran 1998/1999 mencapai peningkatan hingga 143% hal ini merupakan dampak inflasi yang terjadi akibat krisis moneter pada tahun anggaran 1997/1998. Pengeluaran rutin yang sangat tinggi dialami lagi oleh Pemerintah Kota Kediri pada tahun anggaran 2001 yaitu pada awal pemberlakuan otonomi daerah, dimana pada saat itu terjadi pelimpahan tanggung jawab pemerintahan dari Pusat ke Daerah, salah satu bentuk pelimpahan tersebut adalah dalam hal fiskal.

Pengeluaran untuk pembangunan pada saat krisis ekonomi berlangsung yaitu pada tahun anggaran 1997/1998 mengalami penurunan hingga 2,20%. Penurunan tersebut karena dana pemerintah tersedot untuk membiayai pemulihan ekonomi yang sangat membebani perekonomian rakyat. Pembangunan yang tinggi dilakukan Pemerintah Kota Kediri pada tahun anggaran 2002, dimana pada saat itu pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya meningkatkan pembangunan untuk bisa menstimulasi peningkatan PAD.

Pengeluaran pembangunan pada era otonomi daerah terus meningkat tajam pada tahun anggaran 2001 dan 2002. Besarnya kenaikan biaya pembangunan pada tahun anggaran 2003 hanya 3,69% dengan jumlah Rp. 63.650.826.950,00. Belanja untuk pembangunan relatif besar karena hasil pembangunan diharapkan akan mampu memberikan nilai ekonomis yang dapat menopang penerimaan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi PAD terhadap total penerimaan APBD berikut ini adalah tabel kontribusi PAD terhadap APBD

Tabel 9: Perkembangan Kontribusi PAD terhadap APBD Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003.

Tahun Anggaran	PAD (Dalam Rupiah)	APBD (Dalam Rupiah)	Kontribusi (%)
1990/1991	1,557,128,781.32	6,253,082,069.72	24,90
1991/1992	1,789,841,595.53	7,935,544,119.00	22,55
1992/1993	2,104,070,557.64	12,099,188,036.58	17,39
1993/1994	2,402,181,328.36	11,762,926,637.12	20,42
1994/1995	2,704,819,637.09	13,507,688,027.23	20,02
1995/1996	3,355,116,873.09	13,761,824,431.63	24,38
1996/1997	4,222,450,878.37	17,065,881,978.87	24,74
1997/1998	4,582,517,415.21	18,668,153,770.71	24,55
1998/1999	7,453,004,764.98	36,855,342,071.18	20,22
1999/2000	7,775,510,289.24	53,955,700,991.24	14,41
2000	7,871,025,033.56	52,231,071,218.08	15,07
2001	13,704,520,488.66	128,437,969,493.74	10,67
2002	21,246,976,875.97	188,749,300,359.30	11,26
2003	26,209,849,527.16	241,706,953,130.33	10,84

Sumber : Bagian Keuangan Kota Kediri, Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Kontribusi PAD terhadap total APBD belum mencapai 25% dari seluruh total APBD. Di era otonomi daerah kontribusi PAD justru sedikit sekali yaitu rata-rata 10% dari seluruh nilai PAD. Hal ini berarti bahwa peningkatan PAD harus terus digenjot agar bisa menjadi kontributor terbesar terhadap total penerimaan APBD dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.

4.2.3 Bantuan Pemerintah Pusat

Meski otonomi sudah digulirkan beberapa tahun yang lalu, hingga saat ini tiap-tiap daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua masih belum menunjukkan adanya kemandirian daerah. Bantuan dari pemerintah pusat tetap ada sebenarnya, namun istilahnya saja yang berbeda. Sebelum otonomi daerah bantuan tersebut berupa subsidi daerah otonom dan bantuan pembangunan sedangkan setelah otonomi daerah berlangsung istilah bantuan tersebut diganti dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana perimbangan merupakan dana yang dikumpulkan dari daerah-daerah Kabupaten/Kota dan selanjutnya akan dikembalikan kepada rakyat melalui DAU dan DAK. Untuk mengetahui perkembangan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kediri, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10: Bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Tahun Anggaran	Nilai Bantuan (RP)	Perkembangan (%)
1990/1991	3.877.225.509,45	
1991/1992	5.274.526.167,70	36,04
1992/1993	8.547.889.140,57	62,06
1993/1994	7.690.506.272,08	-10,03
1994/1995	7.869.847.234,20	2,33
1995/1996	7.765.127.468,00	-1,33
1996/1997	9.157.366.633,00	17,93
1997/1998	10.730.998.036,00	17,18
1998/1999	24.984.374.228,00	132,82
1999/2000	39.426.824.254,00	57,81
2000	38.281.895.323,00	-2,90
2001	111.280.214.000,00	190,69
2002	113.178.793.750,00	1,71
2003	122.340.000.000,00	8,09
Rata-rata	36457542001,15	36,06

Sumber : Bagian Keuangan Pemkot Kediri TA. 1990/1991-2003

Bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kediri sebelum otonomi daerah rata-rata mencapai kenaikan pada setiap tahun anggaran, dan begitu juga paska pemberlakuan otonomi daerah. Namun, pada tahun anggaran 1993/1994 terjadi penurunan dan tahun anggaran 1992/1993-1995/1996. Bantuan dari Pemerintah Pusat justru mengalami penurunan. Pada saat krisis moneter menerpa bangsa Indonesia. Pada tahun anggaran 1998/1999 kenaikan jumlah bantuan mencapai 132,82% dari tahun sebelumnya. Saat pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001 bantuan pemerintah pusat justru mengalami peningkatan sebesar 190,69%, hal ini merupakan indikasi bahwa daerah belum siap dengan pemberlakuan otonomi daerah.

Sistem otonomi daerah di Indonesia memang mensubsidi daerah menuju otonomi. Walaupun patut kita acungkan jempol kepada Pemerintah

Pusat bahwa sistem yang dipakai pemerintah pusat dalam menggalang dana untuk mensubsidi daerah tingkat I maupun tingkat II merupakan partisipasi aktif daerah sendiri yang diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan. Dimana dana perimbangan tersebut pada dasarnya merupakan upaya gotong royong antar daerah untuk bersama-sama mewujudkan otonomi daerah melalui pemerataan pendapatan daerah, sehingga dalam hal ini Pemerintah Pusat hanya sebagai mediator untuk mendistribusikan dana perimbangan tersebut. Dana perimbangan juga mengurangi kesenjangan antara daerah yang kurang memiliki sumber daya alam yang potensial dengan daerah yang memiliki sumber daya alam potensial, antara daerah yang maju dan terbelakang.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin merupakan suatu parameter sejauh mana Pemerintah Kota Kediri mampu membiayai pengeluaran rutin daerah. Untuk menghitung IKR tersebut dipergunakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran rutin daerah. Berikut ini adalah tabel hasil penghitungan Indeks Kemampuan Rutin Kota Kediri.

Tabel 11 : Analisis Indeks Kemampuan Rutin Kota Kediri
Tahun Anggaran 1990/1991-2003

TA	PAD	Pengeluaran Rutin	IKR
1990/1991	1.557.128.781,32	3.540.680.098,22	43,98
1991/1992	1.789.841.595,53	4.073.330.645,00	43,94
1992/1993	2.104.070.557,64	4.740.486.062,58	44,39
1993/1994	2.402.181.328,36	5.755.280.314,62	41,74
1994/1995	2.704.819.637,09	6.319.618.393,12	42,80
1995/1996	3.355.116.873,09	7.550.540.296,20	44,44
1996/1997	4.222.450.878,37	8.722.577.347,87	48,41
1997/1998	4.582.517.415,21	10.508.278.695,33	43,61
1998/1999	7.453.004.764,98	25.584.735.857,03	29,13
1999/2000	7.775.510.289,24	38.000.502.449,24	20,46
2000	7.871.025.033,56	37.234.323.754,78	21,14
2001	13.704.520.488,66	101.528.707.070,24	13,50
2002	21.246.976.875,97	127.364.744.357,80	16,68
2003	26.209.849.527,16	154.711.962.375,84	16,94

Sumber : Bagian Keuangan Kota Kediri, 1990/1991-2003

Berdasarkan tabel diatas Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Kediri belum mencapai 100% baik sebelum otonomi daerah maupun setelah otonomi daerah. Padahal menurut analisa yang dilakukan oleh Esmara bahwa Indeks Kemampuan Rutin suatu daerah akan dinilai mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah apabila IKR mencapai $\geq 100\%$ sedangkan kurang dari 100% berarti belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin dengan PADnya. Mengacu pada analisa tersebut berarti pemerintah Kota Kediri belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin dari PADnya.

4.3.2 Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOF)

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) merupakan suatu ukuran terhadap tingkat kemandirian daerah dalam hal fiskal. Berikut ini merupakan tabel analisa DOF Kota Kediri pada tahun anggaran 1990/1991-2003.

Tabel 12 : Analisa DOF Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003

TA	PAD	APBD	Transfer Pemsat	DOF (%)
1990/1991	1.557.128.781,32	6.253.082.069,72	4.684.608.242,37	99,28
1991/1992	1.789.841.595,53	7.935.544.119,00	6.155.060.365,33	100,53
1992/1993	2.104.070.557,64	12.099.188.036,58	9.746.036.682,23	89,42
1993/1994	2.402.181.328,36	11.762.926.637,12	9.424.769.832,27	102,74
1994/1995	2.704.819.637,09	13.507.688.027,23	10.375.426.305,98	86,35
1995/1996	3.355.116.873,09	13.761.824.431,63	10.913.708.857,48	117,80
1996/1997	4.222.450.878,37	17.065.881.978,87	13310609382,71	112,44
1997/1998	4.582.517.415,21	18.668.153.770,71	15.054.097.492,70	126,80
1998/1999	7.453.004.764,98	36.855.342.071,18	30.461.028.036,26	116,56
1999/2000	7.775.510.289,24	53.955.700.991,24	45.258.589.218,17	94,74
2000	7.871.025.033,56	52.231.071.218,08	45.258.589.218,17	112,89
2001	13.704.520.488,66	128.437.969.493,74	141.635.662.572,72	-103,84
2002	21.246.976.875,97	188.749.300.359,30	149.194.608.203,92	53,72
2003	26.209.849.527,16	241.706.953.130,33	143.016.823.446,00	26,56
Rata-rata				81,14

Sumber: Bagian Keuangan Kota Kediri, TA. 1990/1991-2003

Berdasarkan tabel diatas, DOF Kota Kediri rata-rata tinggi sebelum pemberlakuan otonomi daerah. Namun DOF Kota Kediri mengalami minus sebesar 103,84 pada awal pemberlakuan otonoomi daerah, kondisi ini dikarenakan beban Pemerintah Kota Kediri menjadi jauh lebih tinggi dengan adanya pelimpahan wewenang keuangan dari Pusat ke Daerah. DOF Kota Kediri juga mengalami penurunan yang sangat tajam dibandingkan DOF sebelum otonomi daerah. Semakin menurunnya DOF tersebut salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan pemerintah yang tidak dapat diimbangi oleh peningkatan pendapatan.

Oleh karena itu penggalan sumber penerimaan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi akan mampu mendongkrak pendapatan daerah yang dapat meningkatkan derajat otonomi Kota Kediri. Derajat otonomi yang tinggi akan mendorong perekonomian suatu wilayah lebih

berkembang pesat karena pemerintah dapat membiayai sektor-sektor riil tanpa harus menunggu dana dari pusat. Sektor riil yang berkembang akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, semakin tinggi pendapatan masyarakat semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

4.3.3 Analisis Pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat terhadap DOF Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier Sederhana. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah bantuan Pemerintah Pusat sedangkan variabel dependennya (Y) adalah Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Kediri.

Dengan menggunakan model yang telah disyaratkan dalam metode Ordinary Least Square (OLS) dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS, maka dihasilkan data output sebagaimana tercantum dalam tabel 12 di bawah ini.

Tabel 13 : Hasil Regresi Pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal (Y)

Variabel	Parameter	Koefisien	t-value	Sig nifi cant
Konstanta	b_0	118,345	8,405	0,000
Bantuan Pemerintah Pusat (X_1)	b_1	-0,000000001020	-4,077	0,002
R-Square	0,581			
Adjusted R2	0,546			
Durbin Watson	2,489			
F-Value	16,619 (p=0,002)			

Sumber : Lampiran

Berdasarkan data tabel 12 diatas dibuat persamaan regresi linier sederhana antara Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Kediri Tahun Anggaran 1990/1991-2003:

$$Y = 118,345 - 0,000000001020X_1$$

Dari persamaan regresi linier sederhana diatas dapat diinterpretasikan beberapa hal sebagai berikut:

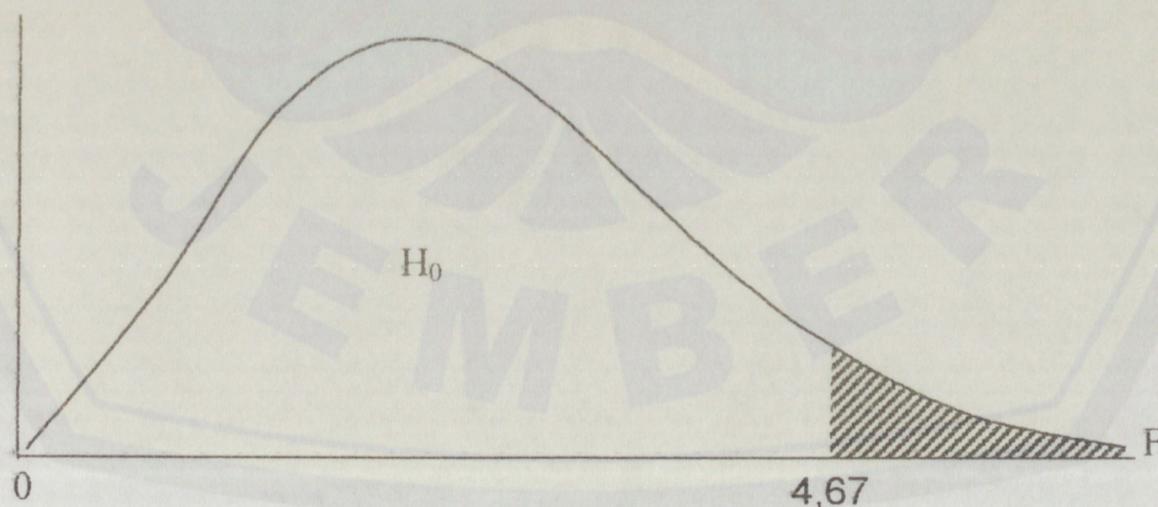
Nilai konstanta 118,345 sebagai variabel eksogeneous yang mempunyai nilai positif, artinya besarnya DOF (Y) adalah 118,345 pada saat besarnya bantuan Pemerintah Pusat (X_1) sama dengan nol.

Variabel bantuan Pemerintah Pusat mempunyai koefisien regresi sebesar $-0,000000001020$, hal ini berarti jika bantuan Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka besarnya Derajat Otonomi Fiskal akan mengalami penurunan sebesar $0,000000001020$ satuan.

Adjusted R^2 0,546 menunjukkan bahwa kontribusi besarnya Variabel bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal Kota Kediri adalah 54,6%, sedangkan sisanya sebesar 45,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.3.4 Uji Statistik

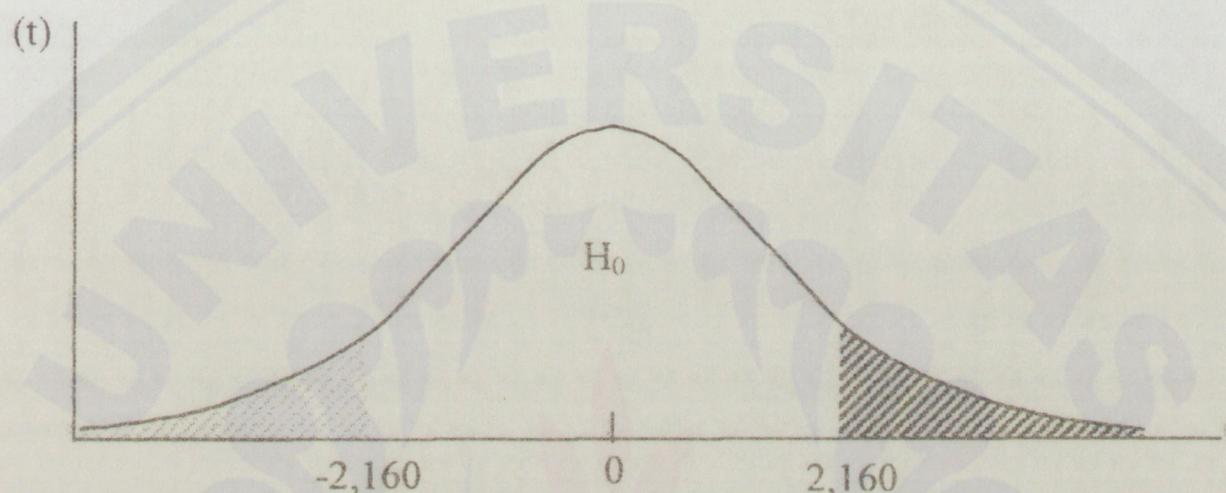
a. Uji Statistik F



Gambar 2
Uji Statistik F

Hasil uji statistik f pada tingkat kesalahan 5%, diperoleh nilai f hitung sebesar 16,619 dengan f tabel sebesar 4,67 maka menolak hipotesis nol ($F_{hitung} > F_{tabel}$). Signifikansi dari uji statistik F ini juga ditunjukkan oleh besarnya probabilitas kesalahan sebesar 0,2%. Hal ini menunjukkan besarnya Bantuan Pemerintah Pusat mempengaruhi besarnya DOF Kota Kediri.

b. Uji Statistik t



Gambar 3
Uji Statistik t

Hasil uji statistik t pada tingkat kesalahan 5% menunjukkan bahwa Bantuan Pemerintah Pusat (X) mempunyai nilai t hitung sebesar $-4,077$ merupakan nilai yang berada di daerah penolakan hipotesis nol yang berarti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap DOF. Signifikansi dari variabel ini juga ditunjukkan oleh besarnya probabilitas kesalahan sebesar 0,2%.

4.3.5 Uji Ekonometrik

Untuk menguji ketetapan penggunaan model persamaan tersebut, perlu diadakan pengujian asumsi klasik, agar model dalam persamaan yang dihasilkan sebelumnya dapat diterima secara ekonometrik, dan estimator-estimator yang diperoleh dengan Metode Kuadrat Terkecil (OLS) sudah memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), untuk itu

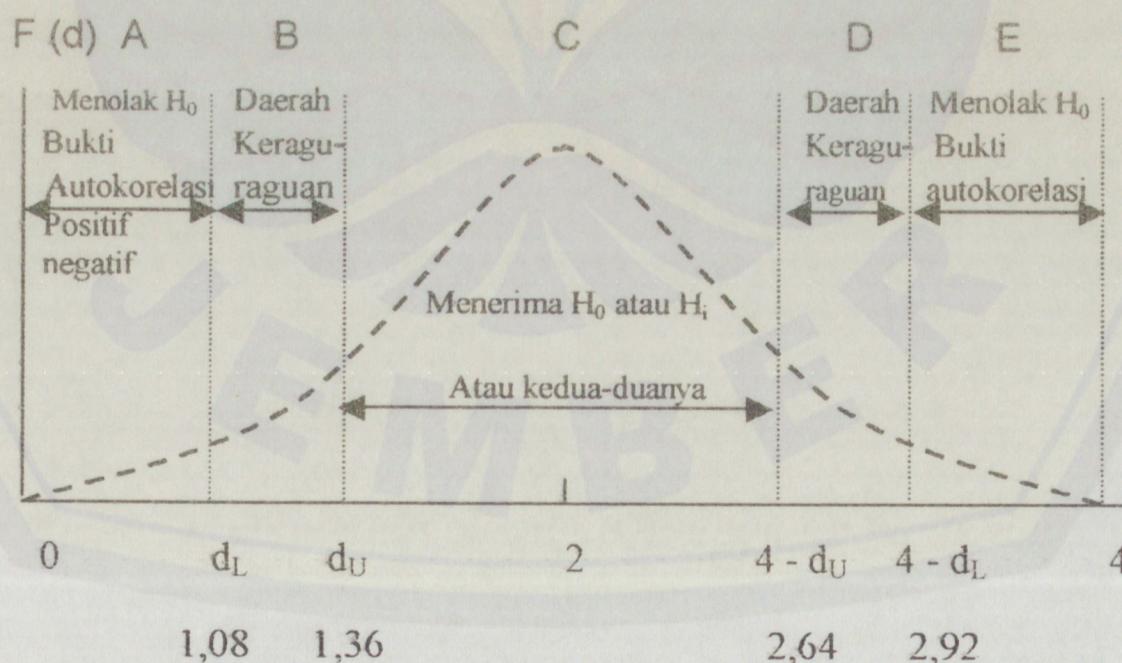
diadakanlah pengujian asumsi klasik diantaranya Multikolinearitas, Autokorelasi dan Heterokedastisitas sebagai berikut:

a. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan yang sempurna atau saling berkaitan antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Dalam penelitian ini hanya terdapat dua variabel yaitu variabel terikat dengan variabel bebas, oleh karena secara otomatis tidak terdapat adanya multikolinearitas yang ditunjukkan oleh hasil pengujian bahwa VIF bernilai 1,00.

b. Uji Autokorelasi

Hasil estimasi dengan menggunakan pengujian Durbin Watson Test menunjukkan bahwa $d = 2,489$. Nilai d pada tingkat signifikansi 5% memiliki $d_L = 0,95$ dan $d_U = 1,54$, Nilai d berada diantara nilai d_U dan $4 - d_U$, ini menunjukkan d berada pada daerah penerimaan hipotesis nol, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hasil regresi linier sederhana penelitian ini tidak terdapat autokorelasi. Keterangan batas daerah terjadinya autokorelasi ditunjukkan dalam gambar 4 dibawah ini.



Gambar 4 : Statistik d Durbin Watson

Keterangan :

Daerah A : daerah yang terdapat autokorelasi positif

Daerah B : daerah tanpa keputusan

Daerah C : daerah tidak terdapat autokorelasi

Daerah D : daerah tanpa keputusan

Daerah E : daerah yang terdapat autokorelasi negatif

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila distribusi probabilitas tetap sama (konstan) dalam semua observasi X_i dan varians setiap residual adalah sama untuk semua nilai dari variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan Uji Glesjer (Glesjer Test) atau juga dengan Uji Park (Park Test). Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glesjer yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel bebas. Kriteria pengujiannya adalah jika hasil regresi residual terhadap seluruh variabel bebas mempunyai nilai t hitung yang tidak signifikan maka dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian lolos dari adanya heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan Hasil Uji dengan menggunakan uji Glesjer menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} dari variabel bebas mempunyai nilai t_{hitung} yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} atau seluruh t_{tabel} tidak menunjukkan signifikansi terhadap persamaan pada uji Glesjer, ini berarti dari model tersebut dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

4.3.6 Pembahasan Hasil Estimasi

a. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Kediri belum mencapai 100%, hal ini berarti bahwa PAD belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah. Untuk itu upaya peningkatan PAD harus lebih dioptimalkan kembali agar dapat membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah. Peningkatan PAD yang masih belum dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Kediri adalah usaha daerah. Kota Kediri hanya memiliki tiga jenis hasil usaha daerah yaitu Bank Jatim yang berupa penanaman saham, PDAM dan BPR. Kota Kediri. Potensi untuk melakukan jenis usaha lainnya masih banyak lagi misalnya Taman Rekreasi dan Hiburan, Wisata Alam dan jenis usaha-usaha lainnya. Upaya-upaya peningkatan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi harus dikaji ulang atas efektifitas dan efisiensi yang telah dijalankan selama ini, jika memang ada yang perlu dibenahi untuk melangkah lebih baik dalam usaha peningkatan PAD maka para birokrat harus tegas terhadap permasalahan yang ada dan segera mencari solusi. Sehingga upaya peningkatan pendapatan bisa menghasilkan output sesuai dengan harapan.

b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Kediri

DOF Kota Kediri rata-rata 81,14% pada periode anggaran 1990/1991-2003. Angka tersebut merupakan angka yang tinggi karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan untuk membiayai APBD sebesar 81,14%. DOF yang tinggi tersebut sangat ironis ketika otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001. Pada awal otonomi daerah Kota Kediri memiliki DOF -103, hal ini sangat menurun drastis karena pada tahun anggaran 2000 telah mencapai DOF sebesar 112%. Kondisi seperti ini dikarenakan masa transisi yaitu dari sebelum otonomi daerah menuju otonomi daerah. Dimana kita ketahui bahwa otonomi daerah tersebut dibarengi oleh pelimpahan wewenang baik secara fiskal maupun

non fiscal. DOF yang mencapai negatif tersebut dikarenakan pelimpahan fiskal dari Pemerintah Pusat ke Daerah, sehingga beban pengeluaran Pemerintah Kota Kediri menjadi jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2002, DOF Kota Kediri sudah mulai pulih dengan nilai DOF sebesar 53,72%. DOF yang tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pada tahun 2003 menurun hingga mencapai 26,56%. DOF akan mencapai angka yang relatif tinggi jika antara peningkatan penerimaan dengan pengeluaran pemerintah dapat mencapai tingkat perkembangan yang sama. Fenomena yang selama ini terjadi bahwa tingkat kenaikan pengeluaran pemerintah dengan tingkat kenaikan penerimaan pemerintah tidak sebanding, sehingga sering dijumpai DOF yang menurun bahkan mencapai angka negatif seperti yang terjadi pada awal otonomi daerah.

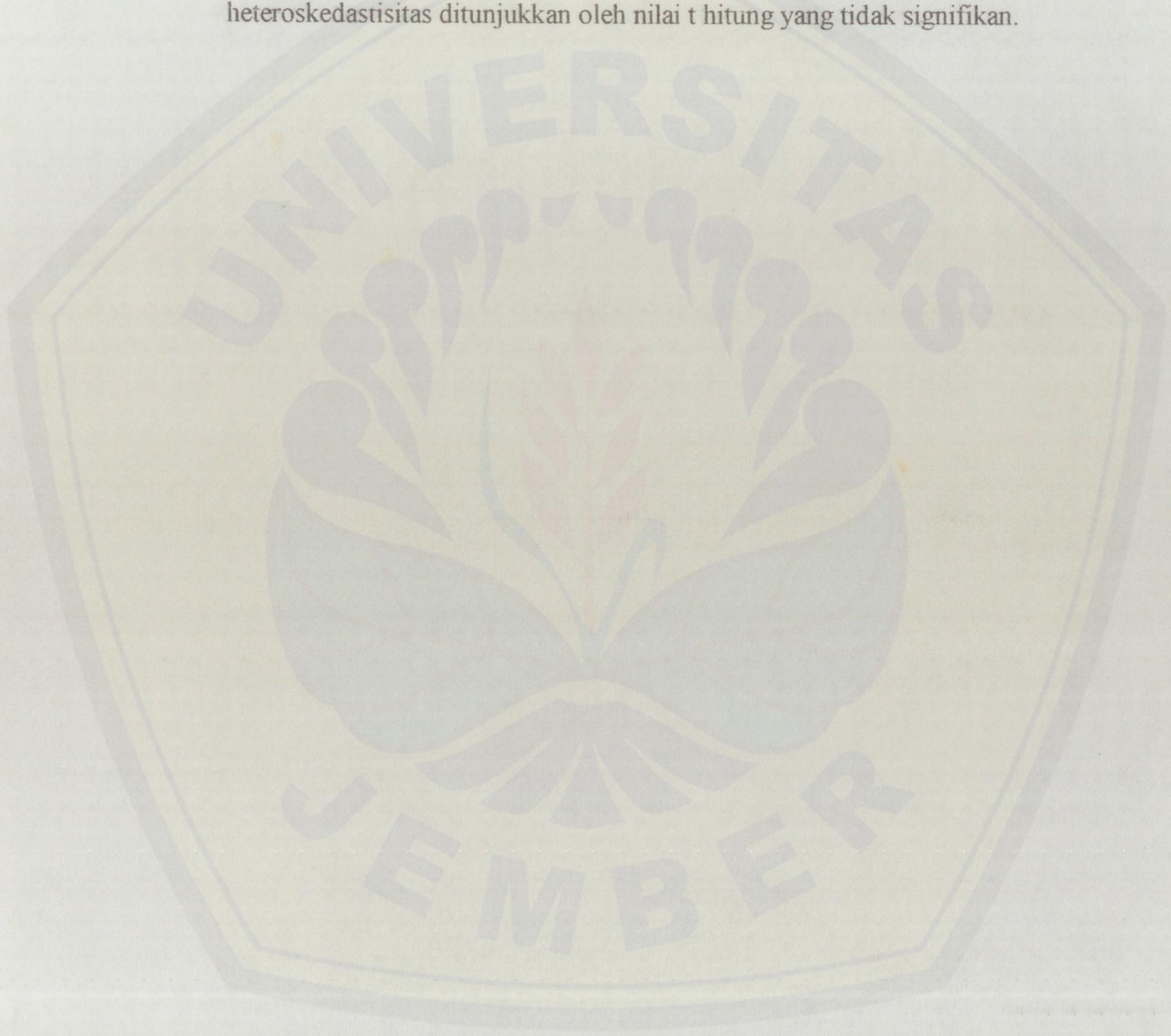
c. Analisis Kuantitatif Bantuan Pemerintah Pusat terhadap DOF Kota Kediri

Berdasarkan hasil estimasi diatas, maka dapat dilakukan pembahasan mengenai pengaruh bantuan pemerintah pusat terhadap DOF. Variabel bantuan pemerintah pusat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap DOF Kota Kediri. Secara empiris dapat dibuktikan dengan uji statistik.

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 16,619 dengan F_{tabel} sebesar 4,67 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) maka menolak hipotesis nol. Signifikansi dari uji F ini ditunjukkan oleh besarnya probabilitas sebesar 0,2%. Hasil uji t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -4,077 yang berada di daerah penolakan hipotesis nol yang berarti bantuan pemerintah pusat berpengaruh terhadap DOF Kota Kediri. Signifikansi dari uji ini juga ditunjukkan oleh probabilitas kesalahan sebesar 0,2%.

Hasil uji ekonometrik menunjukkan bahwa dalam analisa regresi bantuan pemerintah pusat terhadap DOF Kota Kediri tidak menunjukkan adanya multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Multikolinearitas secara otomatis tidak terdapat dalam uji ekonometrik

yang penulis lakukan karena didalam regresi linear sederhana hanya terdapat dua variabel yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Sedangkan kita tahu bahwa multikolinearitas terjadi karena adanya hubungan yang sempurna antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Autokorelasi juga tidak terdapat didalam hasil uji ekonometrik karena nilai d pada tingkat signifikansi 5% berada diantara d_U dan $4 - d_U$ (daerah penerimaan hipotesis nol). Sedangkan tidak adanya heteroskedastisitas ditunjukkan oleh nilai t hitung yang tidak signifikan.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kota Kediri selama periode tahun anggaran 1990/1991-2003 masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil analisa bahwa IKR Kota Kediri belum mencapai 100%, yang berarti bahwa PAD Kota Kediri belum mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah.
2. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kota Kediri pada periode tahun anggaran 1990/1991-2003 rata-rata tinggi yaitu mencapai 81,14%. Namun sejak diberakukannya otonomi daerah DOF Kota Kediri menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan otonomi daerah, hal ini dikarenakan adanya pelimpahan tanggung jawab fiskal dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Hal ini secara otomatis beban Pemerintah Kota Kediri menjadi sangat berat.
3. Pengaruh Bantuan Pemerintah Pusat terhadap Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Kota Kediri sangat tinggi yaitu 54,6% sedangkan 45,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Pengaruh tersebut telah diuji secara statistik dengan uji F dan uji t dan juga uji ekonometrik yang tidak menunjukkan adanya autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang diambil diatas, maka penulis mengajukan saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

1. Adanya evaluasi terhadap upaya peningkatan PAD agar dapat menghasilkan PAD yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah.

2. Dalam upaya peningkatan PAD diharapkan pemerintah tidak meyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mobilitas penduduk, barang dan jasa serta kegiatan ekspor dan impor.
3. dalam peningkatan PAD Pemerintah Kota Kediri lebih meningkatkan pada pemberdayaan potensi SDA maupun SDM bukan pada eksploitasi potensi SDA atau SDM. Dalam contoh kasus eksploitasi SDA adalah proyek yang hanya menguntungkan Pemerintah Daerah tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan rakyat seperti eksplorasi tambang emas sedangkan eksplotasi SDM contohnya adalah pengiriman TKI keluar negeri setelah terjadi kasus yang tidak diinginkan Pemerintah Daerah tidak memberikan kepeduliannya untuk membantu solusi permasalahan yang terjadi di luar negeri, padahal kita tahu mereka adalah penghasil devisa negara dan pemasukan bagi pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Rekapitulasi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991-1995/1996.* Bagian Keuangan Pemerintah Kota Kediri.
- Bawazier, Fuad. 1996. *Pungutan Pada Dunia Usaha.* Dalam Seri Kajian Fiskal Moneter No. 19/VIII/1996. Jakarta: Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter (CFMS)
- Chennery. 1979. *Financing State And Local Government.* Third Edition. Washington DC: The Brooking Institution.
- Dajan, A. 1986. *Pengantar Metode Statistik.* Jilid II. Jakarta: LP₃ES.
- Davey, Kenneth. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah. Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga.* Terjemahan Amanullah. Jakarta. UI-Press
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.* Jakarta: UI Press.
- DPRRI dan Presiden Megawati. 2004. *Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.* Oktober 2004. Internet.
- GBHN 1993
- Gujarati, D.1995. *Ekonometrika Dasar.* Jakarta: Erlangga.
- Ibnurejo, Samugjo. 1995. *Pentingnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.* MIMEO. Makalah pada Seminar Otonomi DATI II. Bangkinang Riau.
- Kota Kediri Dalam Angka 2003.* Kerjasama BPS Kota Kediri dengan Bappeko Kediri.
- Kamaludin, Rustian. 1984. *Keuangan Daerah Kotamadya Padang Panjang: Profil, Potensi Dan Pembangunan.* Dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia vol. XXXII No. 4 April 1985. Jakarta. LP₃ES.
- Kingsley, G. Thomas. 1996. *Despite Decentralization: Disadvantages, Dependence and On Going Control Power In The Inland-The Case Of Wuhan, The Chine Quarteney.* Autumn Journal. P.419.
- Kristiadi. 1992. *Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.* *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta.

- Kaho, Josef Riwu. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Laporan Penerimaan Pajak/Retribusi Triwulan I Tahun Anggaran 1999/2000*. Dinas Pendapatan Kota Kediri.
- Laporan Triwulan IV (Desember 2003) Pendapatan Kota Kediri Tahun Anggaran 2003*. Dinas Pendapatan Kota Kediri.
- Lains, Alfion. 1985. *Pembangunan Daerah Dalam Orde Baru*. Dalam *Prisma* No. 4 April 1985. Jakarta. LP₃ES.
- Maskun, Sumitro. 1996. *Urgensi Penerapan Otonomi Daerah Sebagai Tuntutan Pasar Bebas : Evaluasi dan Langkah Strategis Bagi Pelaksanaan Uji Coba Percontohan Penerapan Otonomi Daerah*. Makalah belum disampaikan
- Nanga, Muana. 1991. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II (Suatu Studi Di Kabupaten Malang, Probolinggo Dan Trenggalek, Propinsi Jawa Timurk Tesis Pasca Sarjana UGM)*. Yogyakarta: Tidak dipublikasikan periode 1999-2004
- Pontjowinoto. 1991. *Alternatif Reformasi Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Daerah*. dalam *Prisma* No. 8. Agustus 1991. Jakarta: LP₃ES.
- Program Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2002-2005*. Bappeko Kediri. 2002
- Perda Kota Kediri No. 6 Tahun 1997 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997*. Bagian Keuangan Kota Kediri.
- Perda Kota Kediri No. 10 Tahun 1998 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998*. Bagian Keuangan Kota Kediri.
- Perda Kota Kediri No. 2 Tahun 1999 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999*. Bagian Keuangan Kota Kediri.
- Perda Kota Kediri No. 4 Tahun 2000 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000*. Bagian Keuangan Kota Kediri.
- Perda Kota Kediri No. 7 Tahun 2001 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000*. Bagian Keuangan Kota Kediri.

- Perda Kota Kediri No. 7 Tahun 2002 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.* Bagian Keuangan Kota Kediri.
- Perda Kota Kediri No. 2 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.* Bagian Keuangan Kota Kediri.
- Perda Kota Kediri No. 1 Tahun 2004 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.* Bagian Keuangan Kota Kediri.
- Fisher, C. Ronald. 1996. *State and Local Public Finance.* United State of America: Times Mirror Higher Education Group.
- Radianto, Ella. 1996. *Paper Diskusi: Peranan Otonomi Daerah Dalam Era Globalisasi Dipublikasikan Harian Kompas.* 11 Desember 1996.
- . 1997. *Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II, Suatu Studi Di Maluku.* Dalam Prisma. Volume IV. Nomor 4 Bulan Oktober-Desember. Jakarta: LP₃ES
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah.* Surabaya: Airlangga University Press.
- Singarimbun, Masri. dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: LP₃ES
- Soelistyo. 1982. *Pengantar Ekonomi I.* Yogyakarta: BPFE.
- Supranto, J. 1995. *Ekonometrika.* Jakarta: Lembaga FE UI.
- Santoso, Bagus. 1995. *Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah,* dalam Prisma No. 4 April 1995. Jakarta: LP₃ES.
- Todaro, Michael P. 1985. *Economic Development in Third World.* Third Edition. New York: Long Man Group Ltd.
- , 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004: Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.*
- Wijaya, A.W. 1992. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II.* Jakarta: Rajawali Press.

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Bant. Pemsat ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: DOF

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,762 ^a	,581	,546	40,1223

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,581	16,619	1	12	,002	2,489

a. Predictors: (Constant), Bant. Pemsat

b. Dependent Variable: DOF

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26754,049	1	26754,049	16,619	,002 ^a
	Residual	19317,593	12	1609,799		
	Total	46071,642	13			

a. Predictors: (Constant), Bant. Pemsat

b. Dependent Variable: DOF

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	118,345	14,081		8,405	,000
	Bant. Pemsat	-1,020E-09	,000	-,762	-4,077	,002

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant) Bant. Pemsat					
		-,762	-,762	-,762	1,000	1,000

a. Dependent Variable: DOF

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Bant. Pemsat
1	1	1,648	1,000	,18	,18
	2	,352	2,164	,82	,82

a. Dependent Variable: DOF

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-6,4979	114,3882	81,1414	45,3652	14
Residual	-108,6282	50,8692	-8,12E-15	38,5483	14
Std. Predicted Value	-1,932	,733	,000	1,000	14
Std. Residual	-2,707	1,268	,000	,961	14

a. Dependent Variable: DOF

Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Bant. Pemsat ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,000 ^a	,000	-,083	40,1223056

Model Summary^b

Model	Change Statistics					Durbin-Watson
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,000	,000	1	12	1,000	2,489

a. Predictors: (Constant), Bant. Pemsat

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,000	1	,000		, ^a
	Residual	19317,593	12	1609,799		, ^a
	Total	19317,593	13			

a. Predictors: (Constant), Bant. Pemsat

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8,120E-15	14,081		,000	1,000
	Bant. Pemsat	,000	,000	,000	,000	1,000

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant) Bant. Pemsat	,000	,000	,000	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Bant. Pemsat
1	1	1,648	1,000	,18	,18
	2	,352	2,164	,82	,82

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-8,12E-15	-8,12E-15	-8,12E-15	1,935227E-22	14
Residual	-108,6282	50,869244	1,02E-15	38,5482644	14
Std. Predicted Value	,000	,000	,000	,000	14
Std. Residual	-2,707	1,268	,000	,961	14

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral BASUKI RAKHMAD 15 ☎ 682955
K E D I R I

Kediri, 22 Pebruari 2005

Nomor : 027 / 60 / 419.33/2005
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Dispenda
2. Kepala Biro Pusat Statistik
3. Kepala Bappeko
4. Pimpinan Bank Indonesia
5. Kepala Bagian Keuangan
di

KEDIRI

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor : 107/325.3..1/PL.5/2005 tanggal 17 Januari 2005 perihal : Riset / survey, kami memberikan rekomendasi untuk mengadakan penelitian di wilayah kerja Saudara kepada :

Nama : ATIK NURYANTI
NIM : 99 - 1104
Pendidikan / pekerjaan : Mahasiswa
Tingkat / semester : XII
Program Studi : Fakultas Ekonomi
Konsentrasi : -
Alamat : Jl. Halmahera Raya No.1 Jember
Tema Penelitian : Analisis Derajat Otonomi Fiskal Pemerintah Kota Kediri 1990/1991 - 2004
Lamanya Penelitian : 6 (enam) bulan mulai tanggal dikeluarkan
Peserta : 1(satu) orang

Dengan ketentuan bahwa selama melaksanakan kegiatan yang bersangkutan berkewajiban untuk :

1. Mentaati segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
2. Melaporkan hasil kegiatan penelitian.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

An. WALIKOTA KEDIRI
Sekretaris Daerah
Ub.
Asisten Administrasi Pemerintahan


Drs. ACHMAD SUDRADJAD, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 510 089 927

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Yang bersangkutan